

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN  
2008-2022**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh :

**SEKAR AYUNI FEBRIANTI**

**1901036130**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.  
Nama : Sekar Ayuni Febrianti  
NIM : 19010360130  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 02 Mei 2023  
Dosen Pembimbing

  
Dwi Risma Devivanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19701018 199512 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 13 April 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

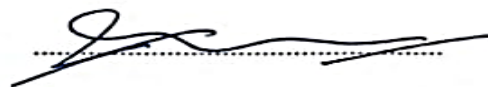
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.  
Nama : Sekar Ayuni Febrianti  
NIM : 19010360130  
Hari : Kamis  
Tanggal Ujian : 13 April 2023

**TIM PENGUJI**

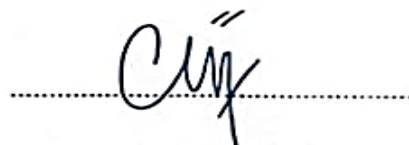
1. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19701018 199512 2 001



2. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA  
NIP. 19670811 199702 1 001



3. Mega Norsita, S.E., M.Acc., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar ustaka

Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 09 Maret 2023



*Sekar Ayuni Febrianti*  
Sekar Ayuni Febrianti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Ayuni Febrianti  
NIM : 19010360130  
Program Studi : S1-Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 2 Mei 2023  
Yang menyatakan,



Sekar Ayuni Febrianti

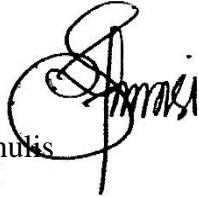
## RIWAYAT HIDUP



Sekar Ayuni Febrianti, lahir di Balikpapan provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 Februari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Akhmad Sidik dan Ibu Ati Bristinawati. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Negeri 003 Balikpapan pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Balikpapan pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan ke jenjang menengah kejuruan di SMK Negeri 3 Balikpapan pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) . Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman yang bertempat di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 2 Mei 2023

  
Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022". Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang ini.

Penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sekaligus selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan masukan selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni. Ak., CA, CTA., CFTA, CIQAR selaku koordinator program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si selaku dosen wali, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Kepala dan Staff Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua penulis yang terkasih, tersayang. dan tercinta yaitu Bapak Akhmad Sidik dan Ibu Ati Bristinawati yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kaka kandung penulis, Wahyu Romadhika Darmawan yang sudah memberikan dukungan serta doa.
10. Teman-teman penulis yaitu Nur Indah Ratnasari, Irzha Fitrah, Anisah Salsabila, Putri Indah Sari, Siti Nurdiana, Zaen Elvi Habibah yang selalu membantu, memberikan semangat serta masukan selama menulis skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.



Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 09 Maret 2023



Sekar Ayuni Febrianti

## **ABSTRAK**

Sekar Ayuni Febrianti, **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.** Dibawah bimbingan Ibu Dwi Risma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Metode penelitian analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 tahun secara berurutan. Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode sensus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah

## **ABSTRACT**

Sekar Ayuni Febrianti, **The Influence of Regional Taxes and Regional Levies on the Regional Financial Independence of Balikpapan City for the 2008-2022 Fiscal Year.** Under the guidance of Mrs. Dwi Risma. This study aims to analyze and prove the effect of regional taxes and regional levies on the regional financial independence of the City of Balikpapan for the 2008-2022 fiscal year which is registered with the Regional Financial Management Board of the city of Balikpapan. The analytical research method used in this study is a quantitative method with multiple linear regression tests. The population and sample in this study were 15 years in a row. The sampling method is by using the census method. The results of this study indicate that regional taxes and regional fees simultaneously have a significant effect on regional financial independence. Partially, regional taxes have a significant effect on regional financial independence, while regional levies partially have no significant effect on regional financial independence.

**Keywords:** Local Tax; Regional Retribution; Regional Financial Independence

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 <i>Stakeholder theory</i> .....	9
2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.2.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.2.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3 Pajak Daerah.....	13
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	13
2.3.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	14
2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	14
2.4 Retribusi Daerah .....	16
2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	16
2.4.2 Dasar Hukum Retribusi Daerah.....	16
2.4.3 Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	17
2.4.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	18
2.5 Kemandirian Keuangan Daerah .....	21
2.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
2.5.2 Dasar Hukum Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
2.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
2.5.2 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah.....	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25

2.7	Kerangka Konseptual .....	30
2.8	Pengembangan Hipotesis.....	32
2.8.1	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
2.8.2	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
2.8.3	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	35
2.9	Model Penelitian.....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1	Definisi Operasional.....	37
3.1.1	Variabel Dependen.....	37
3.1.2	Variabel Independen.....	38
3.2	Populasi dan Sampel.....	39
3.2.1	Populasi.....	39
3.2.2	Sampel.....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5	Alat Analisis .....	41
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	41
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	44
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1	Alat Analisis .....	48
4.1.1	Statistik Deskriptif.....	48
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.1.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.1.4	Pengujian Hipotesis.....	61
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Table 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.....	5
Table 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	48
Tabel 4.2	Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022 .....	49
Tabel 4.3	Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022 .....	51
Tabel 4.4	Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.....	53
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.6	Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.9	Hasil Koefesien Determinasi .....	61
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik F (Simultan) .....	62
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik t (Parsial).....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	36

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>	
Grafik 4.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.....	50
Grafik 4.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Realisasi Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.....	52
Grafik 4.3	Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022.....	54
Grafik 4.4	Uji Heteroskedastisitas .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008 .....	73
<b>Lampiran 2</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2009 .....	74
<b>Lampiran 3</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2010 .....	75
<b>Lampiran 4</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2011 .....	76
<b>Lampiran 5</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 .....	77
<b>Lampiran 6</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 .....	78
<b>Lampiran 7</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 .....	79
<b>Lampiran 8</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 .....	80
<b>Lampiran 9</b> Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 .....	81
Lampiran 10 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 .....	82
Lampiran 11 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 .....	83
Lampiran 12 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 .....	84
Lampiran 13 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 .....	85
Lampiran 14 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 .....	86
Lampiran 15 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sentralisasi yang menyebabkan ketidakmerataan keadilan bagi setiap daerah. Sistem pemerintahan sentralisasi mulai digunakan dari zaman kemerdekaan sampai orde baru. Sistem ini memusatkan segala kekuasaan berada di pemerintahan pusat. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pemerintahan sebelumnya sangat mengandalkan sentralisasi. Kekurangan diberlakukannya sistem tersebut, bahwa semua kebijakan dan keputusan daerah harus bersumber dari keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan keunggulan sistem sentralisasi ini, dimana seluruh kebijakan dan keputusan diatur seluruhnya oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah merasa tidak terlalu diberatkan dengan persoalan yang timbul karena adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan.

Rakyat Indonesia menginginkan adanya keterbukaan dan kemandirian, alasan tersebut yang melandaskan otonomi daerah diselenggarakan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan mendorong kreativitas dan partisipasi dari masyarakat, serta mengurangi perbedaan yang ada antar daerah agar setiap daerah lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang khas dari daerah tersebut (Mardiasmo, 2018).

Salah satu faktor yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah menjalankan otonominya adalah mampu atau tidaknya kemandirian secara finansial. Faktor ini membantu menentukan apakah suatu daerah dapat menjalankan otonominya atau

tidak. (Halim, 2014). Dengan kata lain suatu daerah harus mempunyai kewenangan dan potensi dalam menggali beberapa sumber keuangannya sendiri, menggunakan serta mengelola keuangan yang dihasilkan untuk membiayai keperluan rumah tangganya sendiri.

Kemandirian keuangan bagi daerah merupakan syarat penting bagi desentralisasi otonomi daerah. Sejauh mana kemampuan suatu daerah mengembangkan dirinya melalui penggunaan sumber daya keuangan daerah dapat digunakan untuk mendefinisikan kemandirian daerah dalam pengertian otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dicapai jika pemerintah daerah tersebut mampu menyediakan layanan dan infrastruktur yang menunjang bagi kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerahnya bebas untuk menetapkan prioritas pengeluarannya sendiri dan meningkatkan pendapatannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai tolak ukur besarnya jumlah total pendapatan yang dihasilkan suatu daerah yang dapat mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah (Halim, 2014). Pendapatan Asli Daerah menggambarkan besarnya jumlah total pendapatan daerah yang disebabkan karena kemampuan daerah tersebut dalam menggali keuangan yang ada. Kemampuan suatu daerah untuk mengandalkan pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kemauan daerah untuk berinisiatif dalam menggali potensi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan contoh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan dan mendistribusikan kesejahteraan rakyat. Karena pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai dua sumber penerimaan utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Suratinoyo, 2013). Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari dua sumber pendapatan tersebut, yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah yang lainnya. Dimana pendapatan pengelolaan kekayaan Badan Usaha dan pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dikatakan bahwa tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau dengan kata lain dapat dikatakan konstan. Dengan perbedaan tingkat signifikansi rata-rata sebesar 62%, dengan perbandingan tingkat signifikansi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 81% dan pengelolaan kekayaan Badan Usaha dan pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya sebesar 19%.

Dengan demikian, daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi, apabila daerah tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin besar penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diterima, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian Pemerintah Kota dapat diukur dengan melihat besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkannya, yang mengartikan bahwa daerah dapat dikatakan mampu

membiyai pengeluaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat di bidang. pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah mempunyai peneanaan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Tingkat jumlah pemungutan pajak yang cukup besar diperuntukan untuk daerah yang stabil secara ekonomi. Namun, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah terbatas di daerah tertinggal. Kebijakan tersebut tentunya juga berlaku untuk pemngutan retribusi daerah.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator dari Kemandirian Keuangan. Daerah. Pemerintah daerah akan lebih mudah memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan ukuran Kemandirian Keuangan suatu daerah dengan melihat banyaknya jumlah penerimaan aset yang dimiliki. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

Tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik ditunjukkan dengan ketergantungan yang rendah pada pemerintah pusat. Kota Balikpapan mengantisipasi kisaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun anggaran 2008 hingga tahun anggaran 2022. Kesimpulan ini didukung oleh angka-angka dalam tabel di bawah ini:

**Table 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

TAHUN	PAD	PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD	RETRIBUSI DAERAH	KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100%)	(5)	(6=5/2*100%)
2008	117.630.283.228,06	65.199.182.740,90	55%	26.260.782.381,78	22%
2009	145.291.731.066,95	76.186.347.295,00	52%	27.713.514.688,00	19%
2010	143.796.987.896,69	88.442.340.406,00	62%	29.083.290.115,00	20%
2011	237.029.073.666,77	170.370.071.078,00	72%	27.322.311.854,00	12%
2012	352.034.256.557,17	261.380.972.015,37	74%	43.791.684.142,77	12%
2013	470.719.063.632,97	340.998.751.947,69	72%	57.381.026.799,94	12%
2014	752.582.581.776,47	575.567.514.291,74	76%	68.312.178.262,58	8%
2015	578.959.818.473,84	385.432.289.529,31	67%	48.132.803.944,63	8%
2016	560.365.008.676,29	403.690.047.708,65	72%	46.624.692.440,79	8%
2017	612.250.040.990,01	450.213.740.232,52	74%	47.563.009.260,52	9%
2018	646.868.407.485,10	474.455.854.717,30	73%	55.054.750.772,39	7%
2019	764.087.241.241,05	565.236.192.479,07	74%	55.680.497.069,87	8%
2020	609.057.640.903,42	425.129.773.688,60	70%	49.272.540.221,33	6%
2021	755.062.500.914,79	537.494.991.847,32	71%	43.879.656.032,77	8%
2022	735.443.555.936,58	574.509.798.295,40	78%	40.132.815.666,50	5%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan, 2022

Dalam tabel 1.1 yang merupakan gambaran dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Balikpapan tahun anggaran 2008-2022 mengalami fluktuasi dimana dapat diartikan bahwa penerimaan yang terjadi mengalami kenaikan dan penurunan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui mengenai kemandirian keuangan daerah pada Kota Balikpapan.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu tentang pajak daerah, retribusi daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah yang menjadi acuan dalam

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Feni & Faris (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Maya & Lita (2019) juga menunjukkan dalam penelitiannya bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Balqis, Murdiyati & Amirah (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dimana mereka yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak dan retribusi daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022”. Dimana tingkat Kemandirian Daerah digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan ?

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan ?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Balikpapan.



2. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai kesempatan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan.
3. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 *Stakeholder theory*

Teori yang melandasi penelitian ini adalah *stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan. (Freeman, 1984) mendefinisikan bahwasannya *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization objective*”. Yang dapat diartikan bahwa *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok maupun individu yang terlibat atau dipengaruhi oleh suatu proses yang harus dilalui untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. (Freeman, 2010) menambahkan pemahaman teorinya bahwa “*The stakeholder concept was originally defined as those groups without whose support the organization would cease to exist. The list of stakeholders originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society*”.

Menurut (Putro, 2013) *Stakeholder theory* adalah sekelompok orang yang terhubung dengan organisasi dan memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. *Stakeholder theory* merupakan perusahaan atau organisasi yang menekankan bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, daripada hanya entitas yang hanya beroperasi untuk dirinya sendiri (Ghozali, I., dan Chairiri, 2014). Akibatnya, dukungan yang diterima perusahaan atau organisasi dari para pemangku kepentingan berdampak signifikan terhadap keberadaannya.

Pemangku kepentingan *stakeholder* merupakan pihak-pihak di mana yang berasal dari dalam dan luar organisasi yang mempunyai kepentingan dan

berpengaruh terhadap eksistensi, kinerja, dan keberlangsungan dalam organisasi. Pemangku kepentingan internal adalah khalayak yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau kegiatan lembaga pemerintah. Pemangku kepentingan eksternal, di sisi lain, adalah khalayak yang berada di luar organisasi atau lembaga dan yang harus diberi informasi untuk membangun hubungan yang baik. Akibatnya, semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan sifat, bentuk, dan jenis instansi atau organisasi yang digelutinya. Organisasi yang beroperasi di sektor publik memiliki cakupan sektor yang lebih luas dan bervariasi. Pemerintah daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat, di mana pemerintah yang mempunyai peranan sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu roda pemerintahan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang berperan sebagai *stakeholder*

Menurut (Putro, 2013), pemerintah harus lebih bijak dalam menggali kekayaan daerah, mengelola pendapatan daerah, dan mengelola kekayaan daerah, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua sumber daya alam yang dikuasai oleh pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pasal 33 tersebut menyatakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan perlu adanya hubungan timbal balik yang dapat dilakukan antara pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya timbal-balik semacam ini dapat mengidentifikasi bahwa pemerintah dan rakyat memiliki hubungan serta memiliki kepentingan terhadap organisasi. Dimana dalam merealisasikan amanatnya sebagai *stakeholder*,

perlu adanya tingkat kepercayaan terhadap masing-masing pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pemungutan yang dilakukan berdasarkan pemasukan yang diperoleh daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sebuah harapan yang cukup besar dalam melakukan penyelenggaraan daerah, oleh karena itu pengukuran kesanggupan daerah dalam melaksanakan ekonomi, suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat diartikan bahwa, semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan daerah yang dimaksud dalam hal ini ialah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana dalam membiayai pembangunan daerah, Namun, pada dasarnya belum dapat dikatakan cukup dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah, hal ini yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengelola serta meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang diperoleh oleh suatu daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **2.2.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.2.3.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah yang diperuntukan untuk orang pribadi dan badan usaha, dimana berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tidak mendapat imbalan yang setara dengan kebaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.

#### **2.2.3.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan layanan daerah atau penerbitan izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **2.2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah tersebut, dimana antara lainnya bersumber dari laba perusahaan daerah, laba suatu lembaga keuangan bank, dan laba atas penyertaan suatu modal kepada badan usaha lainnya.

#### **2.2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan :

1. Layanan jaminan
2. Penhasilan bunga

3. Komisi, potongan harga, atau bentuk keuntungan lain yang diperoleh suatu daerah dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa sebagai akibat fluktuasi nilai rupiah relatif terhadap mata uang asing lainnya.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak yang dipungut di suatu daerah adalah dana yang dikumpulkan dari warga negara dan bisnis dan disetorkan ke pemerintah daerah itu tanpa imbalan apa pun kepada pembayar pajak, yang pada dasarnya mempunyai sifat memaksa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dapat digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah, serta untuk kepentingan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Pemungutan pajak di daerah kota Balikpapan saat ini berdasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhi peraturan yang ada. Dasar pemungutan pajak di daerah kota Balikpapan yaitu

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per UU No. 28 Tahun 2009
2. Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, No. 18 Tahun 1997, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, No. 34 Tahun 2000
3. Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001

### **2.3.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah**

1. Pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah daerah memiliki keputusan akhir dan menetapkan harga.
2. Diperoleh dalam hal kejadian atau kegiatan yang dapat dikenakan pajak berdasarkan undang-undang negara bagian atau lokal.
3. Akibatnya, jika wajib pajak lalai memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan denda.
4. Keempat, tidak ada hubungan antara kontribusi seseorang terhadap basis pajak lokalnya dan jumlah uang yang mereka terima sebagai hadiah atau kompensasi.
5. Kas daerah dikreditkan dengan hasil penerimaan pajak pada saat dipungut.

### **2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Penjelasan rinci tentang berbagai pajak daerah diberikan di bawah ini, dengan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Jenis Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat adanya kesepakatan antara dua pihak atau perbuatan atau keadaan sepihak seperti jual beli kendaraan, tukar menukar kendaraan, penerimaan surat pewarisan, atau pendirian suatu usaha.
  - c. Ini bisa berupa pajak atas penjualan dan pembelian properti, atau bisa juga berupa pajak atas pengalihan hak kepemilikan antara dua pihak.

- d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas pembelian dan konsumsi bensin dan solar untuk digunakan pada mobil.
- e. Pajak air permukaan adalah pungutan atas air yang diambil dari permukaan bumi.
- f. Pajak rokok adalah cukai yang dipungut dan dipungut oleh pemerintah dari perokok.

## 2. Jenis Pajak Kabupaten

- a. Pajak hotel dikenakan pada layanan terkait penginapan.
- b. Pelanggan restoran harus membayar pajak atas nilai layanan yang mereka terima.
- c. Pajak hiburan adalah pungutan atas penjualan hiburan.
- d. Pajak iklan dikenakan pada distribusi materi promosi.
- e. Pajak atas penggunaan lampu jalan listrik dikenal dengan nama pajak penerangan jalan.
- f. Pajak parkir, khususnya pajak atas pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diberikan sehubungan dengan atau diberikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- g. Pajak sepeda motor dan skuter, serta biaya parkir dan pengelolaan tempat parkir
- h. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan, khususnya pajak atas kegiatan pengambilan mineral dan batuan bukan logam, baik dari



sumber alam di dalam maupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan

- i. Ketika orang berbicara tentang "pajak air tanah", mereka merujuk pada pungutan yang dibuat atas ekstraksi dan konsumsi air akuifer. Apa yang disebut "pajak sarang burung walet" dikenakan pada semua kegiatan pengumpulan dan pemeliharaan sarang.
- j. Pajak atas semua jenis real estate, baik di dalam negeri maupun di kota, kecuali untuk penggunaan lahan pertanian, kehutanan, dan pertambangan
- k. Biaya yang terkait dengan pembelian properti dan memperoleh hak konstruksi

## **2.4 Retribusi Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan layanan daerah atau penerbitan izin daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **2.4.2 Dasar Hukum Retribusi Daerah**

Pemungutan Retribusi di daerah kota Balikpapan saat ini berdasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhi peraturan yang ada. Dasar pemungutan pajak di daerah kota Balikpapan yaitu

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per UU No. 28 Tahun 2009

2. Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, No. 18 Tahun 1997, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, No. 34 Tahun 2000
3. Peraturan Kanada Tahun 2001 Nomor 66 tentang Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Kompensasi Pelayanan Publik Kota Balikpapan Perda No 9 Tahun 2011 sebagaimana Diubah Dengan Perda No 4 Tahun 2017
  - b. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha (Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017)
  - c. Perda Nomor 6 Tahun 2017 Kota Balikpapan, Indonesia, Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Biaya Perizinan Tertentu

#### **2.4.3 Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

1. Ditentukan oleh kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibebankan sebagaimana mestinya
2. Dapat dikenakan pungutan jika pemerintah daerah yang bersangkutan menawarkan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau organisasi
3. Badan yang menyumbang retribusi daerah berhak menerima imbalan yang setara dari pemerintah daerah sebagai imbalan atas kontribusi yang telah dilakukannya.
4. Sanksi ekonomi dapat diterapkan terhadap pungutan wajib yang tidak memenuhi kewajibannya, yang dalam hal ini menyangkut pembayaran pungutan daerah. Jadi, jika mereka menolak untuk membayar retribusi daerah, mereka akan ditolak aksesnya ke layanan pemerintah daerah.

5. Jumlah uang yang diperoleh dari pemungutan pajak dan disetorkan ke kas daerah sebagai hasil penerimaan daerah tersebut

#### **2.4.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Jenis-jenis retribusi daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Pengertian retribusi jasa umum

Iuran yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat umum dikenal dengan istilah retribusi pelayanan publik. Sebagian besar tanggung jawab ini dilakukan dalam bentuk layanan.

- b. Kriteria retribusi jasa umum

1. Pelayanan yang secara teknis menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada berbagai pemerintah daerah
2. Tawarkan keuntungan kepada orang atau organisasi yang memanfaatkannya.
3. Dapat diterima jika hanya diberikan kepada orang atau organisasi yang memanfaatkannya. (tidak digunakan untuk semua orang)
4. Tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
5. Dihimpun secara efektif dan efisien agar menjadi pendapatan bagi daerah
6. Standar kualitas dan layanan yang tinggi

c. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

1. Dinas Kesehatan
2. Pembuangan Sampah atau Penyediaan Jasa Kebersihan
3. Penggantian Biaya yang Dikeluarkan untuk Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan di Catatan Sipil
4. Biaya yang terkait dengan layanan pemakaman dan layanan pemakaman itu sendiri
5. Kompensasi untuk layanan parkir yang disediakan di jalan umum dan jalan raya
6. Retribusi bagi Penyedia Jasa Pasar
7. Pembatasan Ujian Mengemudi Kendaraan Bermotor, Nomor Tujuh
8. Akibat Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Ganti rugi penyediaan jamban dan pembersihan jamban tersebut
10. Penggantian biaya yang dikeluarkan untuk Pencetakan Peta
11. Kompensasi Jasa Kalibrasi atau Kalibrasi Ulang
12. Kompensasi Pengolahan Limbah Cair
13. Imbalan untuk Belajar dan Membantu Orang Lain
14. Pembalasan atas Pengendalian Menara yang Digunakan dalam Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Biaya jasa usaha adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip komersial. Alasan

mendasar untuk ini adalah bahwa layanan ini juga dapat disediakan oleh pihak swasta.

b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Ini bukan pajak, biaya umum, atau kumpulan biaya untuk izin khusus; itu bukan salah satu dari ini. Sifat layanan yang ditawarkan adalah transaksi bisnis.

c. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

1. Kompensasi untuk pemanfaatan sumber daya lokal
2. Pajak atas Barang yang Dijual di Pasar Eceran dan Grosir
3. Retribusi Tempat Lelang
4. Pajak dan Biaya Terminal
5. Imbalan berupa Tempat Parkir Pilihan
6. Kompensasi Akomodasi, Termasuk Guest House dan Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Pelayanan Pelabuhan
9. Lokasi Kegiatan Olahraga dan Rekreasi
10. Penyeberangan Air
11. Pajak atas Produksi dan Penjualan Badan Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan

a. Pengertian Retribusi Perizinan

Pemerintah dapat mengenakan biaya kepada individu atau badan sebagai imbalan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan yang melibatkan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, fasilitas, infrastruktur,

atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah. Biaya ini disebut sebagai biaya lisensi.

b. Kriteria Retribusi Jasa

1. Kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.
2. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, perizinan merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindari.
3. Jumlah uang yang dibayarkan cukup untuk mengkompensasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan.

c. Jenis-Jenis Retribusi Jasa

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Izin Retribusi Traye
5. Perizinan Usaha Perikanan

## **2.5 Kemandirian Keuangan Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut (Halim & Kusufi, 2013) kemandirian keuangan daerah merupakan Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri semua kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan ketika Pemerintah Daerah mampu menyediakan operasi, infrastruktur, dan warganya sendiri dari pendapatan pajak dan retribusi yang dihasilkan di daerah. Segala bentuk kekayaan daerah, termasuk kekayaan pribadi dan dana yang dikelola pemerintah, dianggap sebagai bagian dari keuangan daerah (Halim, 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventarisasi daerah merupakan dua aspek keuangan daerah yang perlu dikelola secara langsung. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **2.5.2 Dasar Hukum Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya secara mandiri dalam kerangka prinsip desentralisasi.

### **2.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan antar besarnya PAD dengan penerimaan transfer dari pusat. Penentu utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah terdapat pada Pendapatan Asli Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah meliputi seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah (Halim, 2014). Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap daerah harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai daerah yang mandiri, sehingga dapat meminimalisir bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut (Halim, 2014) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Jumlah Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman dikali dengan 100%. Dimana Bantuan Pusat maupun Provinsi merupakan segala macam bentuk bantuan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang mana dana ini bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya guna untuk menunjang kegiatan yang ada di daerah tersebut, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Apabila APBD mengalami defisit, terjadi pengeluaran dari kegiatan pembiayaan, atau terjadi kekurangan dana untuk kas, Pinjaman daerah memberikan opsi tambahan untuk memenuhi kekurangan dana APBD. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, bank, non-bank, dan masyarakat umum semuanya dapat memberikan akses ke pinjaman daerah ini. Dalam Bab V Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan kerangka hukum transaksi keuangan Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Asing. sehingga jelas



Pemerintah Pusat mampu melakukan lebih dari sekedar mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan juga dapat disalurkan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dengan hal demikian, pinjaman daerah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam kaitannya dengan bantuan yang diterimanya dari pihak eksternal, bantuan ini baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pihak pemerintah daerah lainnya. Kemandirian suatu daerah tumbuh seiring dengan meningkatnya rasio PAD yang semakin tinggi. Dan sebaliknya jika rasio PAD yang dihasilkan kecil maka menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah untuk masing-masing daerah.

### **2.5.2 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut (Halim, 2014) peran pemerintah pusat dalam kebijakan otonomi daerah dan lebih khusus lagi peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan UU perimbangan keuangan yang dilakukan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola hubungan instruktif, Jika daerah tidak memiliki cukup uang untuk melaksanakan otonomi daerah, dimana tugas pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah

2. Pola hubungan konsultatif, diyakini daerah mulai mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri, diakrenakan mulai berkurangnya campur tangan dari pemerintah pusat serta lebih banyak memberikan konsultasi,
3. Pola hubungan partisipatif, daerah yang bersangkutan telah mendekati kata mandiri dan mampu dalam melaksanakan urusan otonomi, dikarenakan peran pemerintah pusat yang semakin berkurang.
4. Pola hubungan delegatif, tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat dikarenakan daerah telah dianggap kompeten dan mandiri untuk menangani sendiri untuk melaksanakan urusan otonomi daerahnya

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, mempunyai beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan :

1. Balqis, Murdiyati & Amirah (2018) meneliti tentang Pengaruh Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2013-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan, mengetahui secara parsial pengaruh penerapan pajak terhadap kemandirian keuangan daerah, mengetahui secara parsial pengaruhnya retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dan untuk mengetahui secara parsial pengaruh dana bagi hasil terhadap

kemandirian keuangan daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikansi parameter individu (uji statistik t) dan koefisien determinasi. Dengan menggunakan uji signifikansi parameter secara simultan, menunjukkan bahwa penerapan pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual, hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis ketiga didasarkan pada uji signifikansi parameter individu untuk menunjukkan bahwa biaya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis keempat menggunakan uji signifikansi untuk setiap parameter yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Beny Barlina, Herawati & Ethika (2018) mengkaji bagaimana kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa pemangku kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan organisasi dan memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan 19 kabupaten dan kota di Provinsi

Sumatera Barat sebagai sampel. Informasi tersebut berasal dari laporan realisasi APBD Provinsi Sumbar tahun 2012 sampai dengan 2015. Strategi pemilahan informasi menggunakan strategi pemeriksaan mutlak. Hasil temuan menunjukkan bahwa: (1) pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) pungutan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian finansial dan (4) dana alokasi umum berdampak negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Maya & Lita (2019) mengkaji bagaimana kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analitik kuantitatif dengan uji regresi linier berganda. Populasi dan sampel penelitian ini terdiri dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2014 dan 2017, 29 kabupaten dan 9 kota. Prosedur pengujiannya adalah dengan menggunakan tes terbenam. Dari penelitian menunjukkan hasil bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak terpengaruh oleh DBH dan pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara simultan oleh pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi.
4. Feri & Faris (2019) mengkaji bagaimana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur daerah dan kota terkena dampak pajak dan retribusi daerah. Metode analisis data yang menguji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum menguji hipotesis digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pajak maupun retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

**Table 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Balqis, Sri Murdiati & Amirah (2018)	Pengaruh Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2013-2017	Variabel Independen: Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil  Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan pada Tahun 2013-2017	Metode Regresi Linier Regresi Berganda	1. Pengaruh positif dan signifikan penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah 2. Pengaruh positif dan signifikan penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah 3. Pengaruh positif dan tidak signifikan retribusi terhadap kemandirian keuangan daerah 4. Pengaruh negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Beny Barlina, Herawati, Ethika (2018)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Povinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016)	Variabel Independen: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum  Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Regresi Linier Regresi Berganda	Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
3.	Maya Novitasari & Lita Novitasari (2019)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Regresi Linier Regresi Berganda	Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
4.	Feni Febriyanti & Muhammad Faris (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Metode Regresi Linier Regresi Berganda	Secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## 2.7 Kerangka Konseptual

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada masa reformasi. Dalam mengupayakan pengelolaan daerah dengan tujuan untuk keberlangsungan penyelenggaraan serta pengembangan potensi daerahnya, pemerintah daerah memerlukan pemasukan. Pemerintah daerah mengharapkan pemasukan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, antara lainnya termasuk dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Di mana variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kesanggupan pemerintah untuk mendanai operasinya sendiri, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan bagi penduduk yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. Kemandirian keuangan daerah mewujudkan seberapa besar keterlibatan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, di mana perhitungannya semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal pun semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

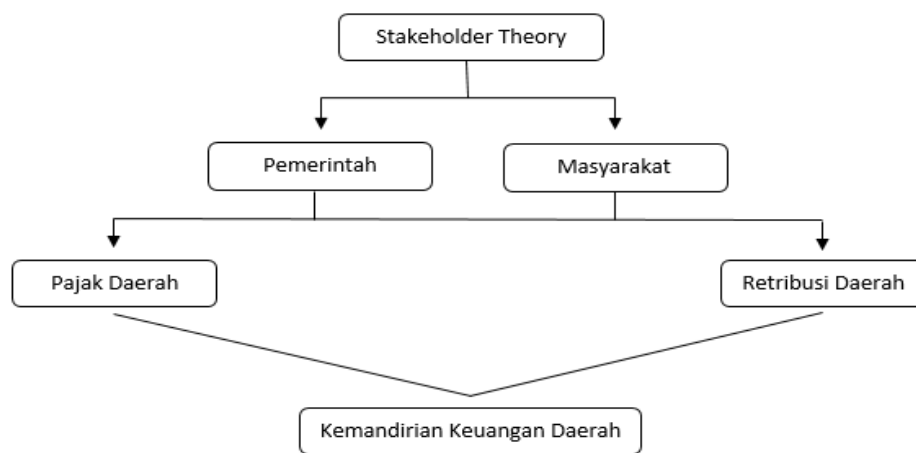
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan penjabaran diatas, maka secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, jika

pemerintah daerah mengenakan pajak dan biaya yang tinggi, maka akan menyebabkan lebih banyaknya pendapatan yang masuk ke kas daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pertumbuhan daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti suatu daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini merupakan pemerintah pusat. Jika ingin mengurangi adanya campur tangan dari pemerintahan pusat maka, harus meningkatkan kemandirian daerah tersebut. Daerah yang mandiri dapat disimpulkan bahwa karena adanya laju perekonomian yang terus meningkat

Penerapan teori stakeholder dalam hubungannya dengan variabel bebas dalam konteks penelitian ini, dimana pemerintah mampu memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat karakteristik sifatnya pajak daerah yang memaksa, maka penting bagi masyarakat untuk memahami perannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut juga harus dapat direalisasikan terhadap retribusi daerah, dimana masyarakat selaku pengguna layanan publik juga perlu memiliki adanya kesadaran wajib pajak terhadap retribusi. Dan dalam teori ini juga sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah. Di mana peran para *stakeholder* internal maupun eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik serta manajer publik



sebagai pengelolanya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keduanya bisa berpotensi menjadi pelaku ekonomi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

*Sumber : Data Diolah, 2022*

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

*Stakeholder theory* merupakan perusahaan atau organisasi yang menekankan bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, daripada hanya entitas yang hanya beroperasi untuk dirinya sendiri. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pengguna layanan publik termasuk dalam kategori pemangku kepentingan eksternal, khususnya masyarakat sebagai wajib pajak, serta pemangku kepentingan internal, seperti Pemerintah Daerah atau pengelola publik, yang keduanya saling mempengaruhi dalam upaya mencapai kemandirian keuangan daerah.

Salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui pajak daerah, yang digunakan untuk membayar segala sesuatu mulai dari tunjangan karyawan hingga proyek pembangunan. Pendapatan pengeluaran ini juga dapat digunakan dalam pembiayaan untuk memberikan kenyamanan untuk semua lapisan masyarakat. Pajak daerah yang pada hakikatnya bersifat memaksa akan memberikan kontribusi yang maksimal sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.

Hasil penelitian (Balqis, 2018) menyatakan bahwa penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah berdampak positif dengan signifikansi nilai  $= 0,000 < 0,05$ . Namun (Barlina et al., 2018) mendapatkan hasil yang berbeda, dimana pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali adanya hubungan pajak daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

H<sub>1</sub>: Diduga Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Balikpapan

### **2.8.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

*Stakeholder theory* merupakan perusahaan atau organisasi yang menekankan bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, daripada hanya entitas yang hanya beroperasi untuk dirinya sendiri. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pengguna layanan publik termasuk dalam kategori pemangku kepentingan eksternal, khususnya masyarakat sebagai wajib pajak, serta pemangku kepentingan internal, seperti Pemerintah Daerah

atau pengelola publik, yang keduanya saling mempengaruhi dalam upaya mencapai kemandirian keuangan daerah.

Pemanfaatan pelayanan publik oleh masyarakat dimaksudkan untuk menerima retribusi daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama. Akibatnya, pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pengelola publik memiliki dampak yang signifikan terhadap keberadaan organisasi.

Pembayaran jasa atau pemberian izin khusus oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari retribusi daerah. Perbedaan faktor yang terjadi antara pemungutan retribusi jenis pendapatan lainnya adalah pertimbangan ada tidaknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi dapat menimpa komunitas pengguna layanan juga dikenal sebagai *stakeholder* eksternal yang memiliki akses ke layanan pemerintah daerah. Meski tidak semerata pajak daerah, tetapi retribusi daerah dapat di harapkan sebagai salah satu sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah. Namun, kemandirian keuangan daerah membaik dengan meningkatnya retribusi daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maya & Lita, 2019) yang membuktikan bahwa retribusi daerah memiliki tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H<sub>2</sub>: Diduga Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di kota Balikpapan

### **2.8.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

*Stakeholder theory* merupakan perusahaan atau organisasi yang menekankan bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, daripada hanya entitas yang hanya beroperasi untuk dirinya sendiri. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pengguna layanan publik termasuk dalam kategori pemangku kepentingan eksternal, khususnya masyarakat sebagai wajib pajak, serta pemangku kepentingan internal, seperti Pemerintah Daerah atau pengelola publik, yang keduanya saling mempengaruhi dalam upaya mencapai kemandirian keuangan daerah.

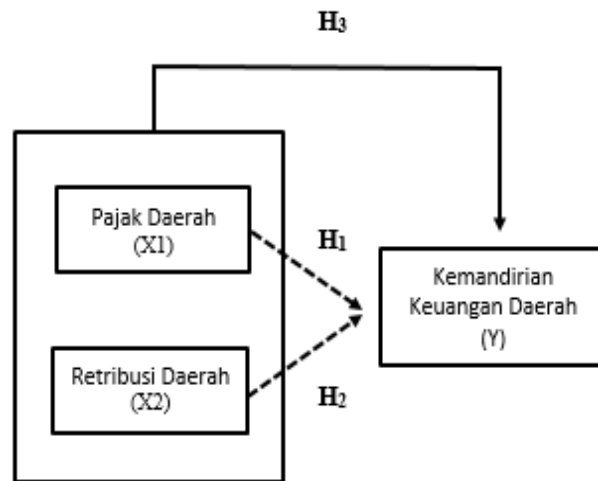
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah merupakan suatu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, di mana sektor ini diharapkan untuk menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Dari penelitian hasil (Febriyanti & Faris, 2019) menyatakan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 77,3% dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H<sub>3</sub>: Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di kota Balikpapan.

## 2.9 Model Penelitian



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

**Sumber : Data Diolah, 2021**

Keterangan :

□ : Variabel

-----> : Parsial

————> : Simultan

Penelitian menggunakan 2 variabel bebas (independen) yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 1 variabel terikat (dependen) yaitu Kemandirian Keuangan Daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional

##### 3.1.1 Variabel Dependen

##### 3.1.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini kemandirian keuangan daerah dijadikan sebagai variabel dependen. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai semua pembangunan masyarakat, pelayanan, dan kegiatan pemerintah dikenal dengan kemandirian keuangan daerah. Besaran bantuan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah. Dengan demikian, suatu daerah dikatakan mandiri jika mendapat bantuan dengan jumlah yang seminimal mungkin dari pemerintah pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

*Sumber : (Halim, 2014)*

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 3.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan dan disetorkan ke daerah tanpa ada imbalan langsung yang dapat dipaksakan untuk dibayar. Keadaan dimana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan pajak daerah itu sendiri, bersamaan dengan diundangkannya peraturan daerah, dan dimana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan sebagai skala pengukuran. Secara khusus digunakan perbandingan antara jumlah uang yang direalisasikan dalam pajak daerah dengan jumlah uang yang direalisasikan dalam total pendapatan daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.1.2.2 Retribusi Daerah

Istilah Retribusi Daerah mengacu pada pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan untuk memberikan layanan tertentu atau mengeluarkan izin tertentu kepada orang pribadi maupun badan. Kontribusi realisasi daerah digunakan sebagai skala pengukuran, dengan perhitungan dari rasio realisasi retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan daerah digunakan untuk menentukan rasio ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Obyek atau subjek penelitian tidak dapat dipisahkan dari penelitian itu sendiri keduanya diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau dapat dikatakan sebagai penunjang keberhasilan suatu penelitian.

Menurut (Martono, 2014) populasi penelitian merupakan kumpulan dari suatu objek atau subjek yang berada disuatu wilayah yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022 menyajikan data populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yang sesuai dengan definisi kependudukan yang disajikan sebelumnya. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian dilakukan sesuai urutan yang diberikan. Data time series terdiri dari pengukuran yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Angka-angka ini dihitung dari periode, siklus, atau variasi tren yang hanya dapat terjadi pada satu bisnis dalam satu waktu.

### **3.2.2 Sampel**

Laporan Realisasi Anggaran kota Balikpapan tahun anggaran 2008-2022 merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pengertian populasi yang telah dikemukakan sebelumnya Menurut (Martono, 2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki kesamaan karakteristik dengan kelompok yang diteliti. Hal ini terjadi karena peneliti melihat populasi secara keseluruhan untuk menentukan trend. Metode pengambilan sampel harus digunakan untuk memilih sampel penelitian.



Penelitian ini menggunakan strategi sampling berbasis sensus sebagai metode penelitiannya. Metode sensus yaitu merupakan teknik penentuan sampel dimana bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan bagi peneliti ketika ukuran sampelnya kecil (kurang dari 30 orang) atau ketika mereka perlu menggeneralisasi dengan margin kesalahan yang kecil. Dari pengertian tersebut maka, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi Anggaran kota Balikpapan tahun anggaran 2008-2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 15 sampel yang berasal dari 15 tahun Laporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data keuangan yang meliputi target dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2022.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi sekunder. Istilah data sekunder digunakan untuk menggambarkan informasi yang telah disusun untuk kepentingan penelitian. Istilah data sekunder digunakan untuk menggambarkan informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan itu sendiri. Data dalam penelitian ini

bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran kota Balikpapan tahun anggaran 2008 sampai tahun 2022.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan di bagian yang telah terkait dengan masalah yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data keuangan yang meliputi target dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008-2022 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

### **3.5 Alat Analisis**

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis berdasarkan metode analisis data yang akan digunakan, dimana regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Sebelum menguji hipotesis dengan metode analisis statistik, digunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil data sampel dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Hal-hal yang sering menjadi patokan analisis lebih lanjut antara lain tentang nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi atas variabel variabel penelitian.

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar dari data yang telah dihasilkan dalam penelitian dengan memberikan sebuah rangkuman sederhana tentang sampel dan ukurannya. Disertai dengan grafik analisis sederhana, statistik deskriptif secara sederhana menggambarkan apa yang telah ditunjukkan oleh data. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan dengan melihat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Model regresi dengan kemungkinan kesalahan peramalan yang paling sedikit adalah model yang baik. Akibatnya, sejumlah hal yang biasanya disebut sebagai asumsi klasik harus dipenuhi sebelum model regresi dapat digunakan. Beberapa asumsi klasik yang perlu dipenuhi yaitu antara lain seperti:

#### **1. Uji Normalitas**

Salah satu model regresi yang baik adalah harus memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data melalui perbandingan data yang dimiliki dengan data retribusi normal yang mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang akan diuji. Apabila asumsi normalitas dilanggar, dapat menyebabkan uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil.

#### **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel variabel bebasnya,

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkaitnya menjadi terganggu.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Jika residual satu pengamatan berbeda nyata dengan residual pengamatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Suatu model regresi dianggap memadai jika varians dari satu pengamatan sama dengan varians dari semua residual.

### 4. Uji Autokorelasi

Karena data deret waktu digunakan, uji autokorelasi sangat penting untuk memverifikasi keberadaan korelasi antara berbagai elemen yang membentuk pengamatan. Uji autokorelasi digunakan dalam model regresi linier untuk melihat apakah ada hubungan antara kesalahan perancu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode (sebelum)  $t-1$ . Ketika ada korelasi antara dua variabel, autokorelasi bisa menjadi masalah. (Ghozali, 2016). Karena residual dalam model regresi tidak independen dari satu observasi ke observasi berikutnya, autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara observasi yang diukur dengan deret waktu. Hal ini karena autokorelasi terjadi ketika residual dalam model regresi tidak independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan adanya autokorelasi dalam regresi tersebut. Dalam penyelidikan khusus ini, uji Durbin-Watson digunakan untuk memastikan apakah ada autokorelasi atau tidak. (tes DW).

**Tabel 3.1 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No Decision	$4 - dl \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2016

### 3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk tujuan menentukan bagaimana variabel independen mempengaruhi hasil dari variabel dependen penelitian, analisis regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menyatakan sifat hubungan yang ada antara variabel-variabel ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y : Kemandirian Daerah

X<sub>1</sub> : Pajak Daerah

X<sub>2</sub> : Retribusi Daerah

A : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi

e : Error

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

Koefisien determinasi, nilai statistik t, dan nilai statistik F digunakan untuk menentukan keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual dan digunakan dalam pengujian hipotesis. Jika nilai uji statistik yang dihasilkan

berada di dalam rentang kritis, yaitu rentang dimana  $H_0$  ditolak, maka hasil perhitungan dapat dianggap signifikan.

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kapasitas model untuk menjelaskan sejauh mana masing-masing variabel independen secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dievaluasi dengan bantuan statistik yang disebut koefisien determinasi ( $R^2$ ). Ada berbagai kemungkinan nilai koefisien determinasi, dari nol hingga satu. Jika nilai  $R^2$  rendah, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kurang baik. Jika nilainya sangat mendekati 1, maka variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan variabel dependen. Saat menganalisis data silang, koefisien determinasi biasanya cukup rendah dibandingkan dengan data deret waktu karena tingkat variabilitas antar pengamat yang tinggi. Sebaliknya, koefisien determinasi untuk data deret waktu biasanya cukup tinggi.

#### 2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Dalam kebanyakan kasus, uji t akan membandingkan nilai t yang dihitung dengan tabel t untuk menjelaskan pengaruh yang diamati terhadap variabel dependen. Namun, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah 0,05 yang setara dengan tingkat kepercayaan 0,95. Hasil uji t yang dihasilkan oleh SPSS ditampilkan dalam tabel koefisien yang menunjukkan apakah:

- a. Tingkat signifikansi  $< 5\%$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa terdapat pengaruh.

- b. Tingkat signifikansi  $> 5\%$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh.

Adapun hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

$H_0$  :  $b_i = 0$ , yaitu tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

$H_a$  :  $b_i \neq 0$ , yaitu ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

### 3. Uji F Statistik

Tingkat signifikansi pengaruh independen secara bersamaan (sekaligus) terhadap variabel dependen dihitung dengan uji F. Metode pengambilan keputusan uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan derajat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Keputusan tentang uji statistik F didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Nilai signifikansi  $\geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak
- 2) Nilai signifikansi  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

$H_0$  : Tidak adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

$H_A$  : Adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Alat Analisis

##### 4.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas atau mendeskripsikan kumpulan data dengan menghitung metrik seperti rata-rata, standar deviasi, nilai ekstrem, dan median. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sinopsis dari penelitian deskriptif. (Ghozali, 2016). Pajak daerah dan retribusi daerah digunakan sebagai variabel bebas sedangkan otonomi keuangan daerah Kota Balikpapan sebagai variabel terikat. Sehingga 15 sampel digunakan dalam sampel, yang merupakan variabel deskriptif dari data tahunan yang dikumpulkan sepanjang tahun anggaran 2008 hingga 2022. Hasil pengolahan semua data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS ditunjukkan di bawah ini.

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	15	.05	.24	.1620	.06889
Retribusi Daerah	15	.01	.03	.0207	.00458
Kemandirian Keuangan Daerah	15	.09	.50	.3093	.14200
Valid N (listwise)	15				

*Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023*

##### 4.1.1.1 Variabel Independen

###### 4.1.1.1.1 Pajak Daerah

Informasi mengenai pajak daerah yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari data tahunan Laporan Realisasi Anggaran yang dikumpulkan selama 15 tahun. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan



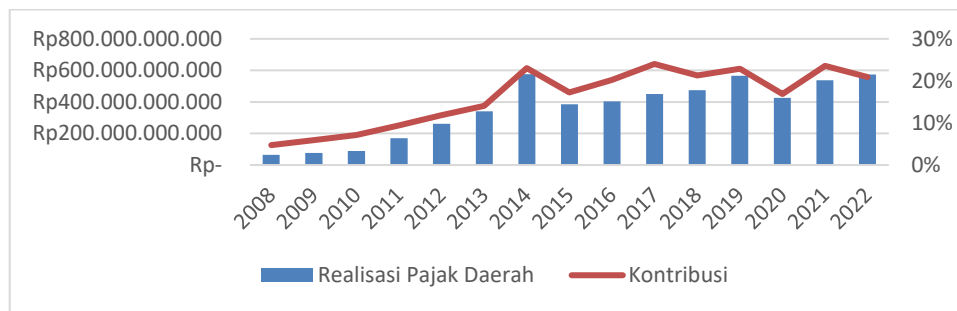
berikut perhitungan angka kontribusi pajak daerah yang diperoleh kota Balikpapan dari tahun 2008-2022:

**Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

TAHUN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN DAERAH	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
2008	Rp 65.199.182.741	Rp 1.376.682.197.238	5%
2009	Rp 76.186.347.295	Rp 1.279.275.431.025	6%
2010	Rp 88.442.340.406	Rp 1.243.280.145.453	7%
2011	Rp 170.370.071.078	Rp 1.804.343.010.489	9%
2012	Rp 261.380.972.015	Rp 2.206.403.604.853	12%
2013	Rp 340.998.751.948	Rp 2.422.211.293.725	14%
2014	Rp 575.567.514.292	Rp 2.498.540.496.958	23%
2015	Rp 385.432.289.529	Rp 2.229.965.797.218	17%
2016	Rp 403.690.047.709	Rp 1.993.392.905.725	20%
2017	Rp 450.213.740.233	Rp 1.873.966.991.358	24%
2018	Rp 474.455.854.717	Rp 2.230.736.621.233	21%
2019	Rp 565.236.192.479	Rp 2.469.528.492.671	23%
2020	Rp 425.129.773.689	Rp 2.515.508.487.764	17%
2021	Rp 537.494.991.847	Rp 2.278.259.847.190	24%
2022	Rp 574.509.798.295	Rp 2.745.380.962.112	21%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan (data diolah)

Jumlah sampel (N) yang ditunjukkan pada tabel 4.1 adalah 15 sampel. Nilai rata-rata adalah 0,1620, pembagian standar adalah 0,06889, dan nilai minimum untuk pajak daerah adalah 0,05 dari tahun 2008 hingga 2022. Nilai maksimum untuk pajak daerah adalah 0,24. Fakta bahwa data tersebut memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data pajak daerah memiliki sebaran yang mendekati rata-rata. Selain data di atas, berikut adalah grafik yang menunjukkan perubahan penerimaan pajak daerah kota Balikpapan dari tahun 2008 ke tahun 2022:



**Grafik 4.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

*Sumber: Data Sekunder dari BPKPD Balikpapan yang diolah, 2023*

Berdasarkan grafik tersebut terlihat adanya variasi tahunan terhadap total penerimaan pajak daerah yang diterima oleh kota Balikpapan. Total penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh kota Balikpapan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 65.199.182.740,90. Hal tersebut mengakibatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah kota Balikpapan sebesar 5% yang terus tumbuh hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah total penerimaan pajak daerah; pendapatan yang dibawa hanya 385.432.289.529,31, dan kontribusi pajak daerah berkurang 17%. Kemudian pada tahun 2016 meningkat lagi hingga tahun anggaran 2019, namun pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 425.129.773.688,60 dengan kontribusi pajak daerah sebesar 17%. Padahal kontribusi kota terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 17%. Dan terakhir pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah kota Balikpapan kembali meningkat sehingga menghasilkan total penerimaan sebesar 537.494.991.847,32 dengan kontribusi sebesar 24%, dan peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2022.

#### 4.1.1.1.2 Retribusi Pajak

Penelitian ini menggunakan data tahunan dari laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Perpajakan Daerah (BKPPD) realisasi kota Balikpapan selama 15 tahun untuk menghitung retribusi daerah. Variabel retribusi daerah dievaluasi dengan bantuan kontribusi retribusi daerah, yang didefinisikan sebagai rasio jumlah total retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah. Dan berikut perhitungan angka kontribusi retribusi daerah yang diperoleh kota Balikpapan dari tahun 2008-2022:

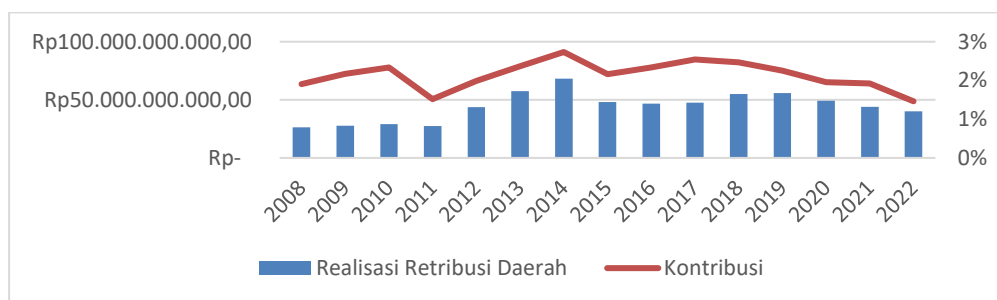
**Tabel 4.3 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH	PENDAPATAN DAERAH	KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
2008	Rp 26.260.782.381,78	Rp 1.376.682.197.238	2%
2009	Rp 27.713.514.688,00	Rp 1.279.275.431.025	2%
2010	Rp 29.083.290.115,00	Rp 1.243.280.145.453	2%
2011	Rp 27.322.311.854,00	Rp 1.804.343.010.489	2%
2012	Rp 43.791.684.142,77	Rp 2.206.403.604.853	2%
2013	Rp 57.381.026.799,94	Rp 2.422.211.293.725	2%
2014	Rp 68.312.178.262,58	Rp 2.498.540.496.958	3%
2015	Rp 48.132.803.944,63	Rp 2.229.965.797.218	2%
2016	Rp 46.624.692.440,79	Rp 1.993.392.905.725	2%
2017	Rp 47.563.009.260,52	Rp 1.873.966.991.358	3%
2018	Rp 55.054.750.772,39	Rp 2.230.736.621.233	2%
2019	Rp 55.680.497.069,87	Rp 2.469.528.492.671	2%
2020	Rp 49.272.540.221,33	Rp 2.515.508.487.764	2%
2021	Rp 43.879.656.032,77	Rp 2.278.259.847.190	2%
2022	Rp 40.132.815.666,50	Rp 2.745.380.962.112	1%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan (data diolah)

Jumlah sampel (N) yang ditunjukkan pada tabel 4.1 adalah 15 sampel. Retribusi daerah memiliki nilai rata-rata 0,0207 dan standar pembagian 0,00458 untuk tahun anggaran 2008 sampai dengan 2022, dengan nilai minimal 0,01 dan nilai maksimal 0,03. Fakta bahwa data tersebut memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa data mengenai kontribusi retribusi daerah tersebar rata-rata. Selain informasi yang telah disampaikan sebelumnya,

grafik yang disajikan di bawah ini menggambarkan pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kota Balikpapan dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2022:



**Grafik 4.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Realisasi Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

*Sumber: Data Sekunder dari BPKPD Balikpapan yang diolah, 2023*

Jumlah pajak daerah yang dipungut oleh kota Balikpapan setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi yang nyata seperti yang digambarkan oleh grafik. Pada tahun 2008, kontribusi pajak daerah Balikpapan terhadap pendapatan daerah sebesar 2%, dan terus meningkat hingga tahun 2010. Total penerimaan retribusi kota Balikpapan sebesar 26.260.782.381,78 pada tahun 2008. Hal ini mengakibatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah kota Balikpapan. Pada tahun 2011 mengalami penurunan jumlah pendapatan retribusi daerah menjadi 27.322.311.854,00 dengan kontribusi hanya sebesar 2%. Namun kembali meningkat pada tahun 2012, mencapai total 43.791.684.142,77 pendapatan retribusi daerah dengan kontribusi sebesar 2%, dan pendapatan retribusi daerah terus meningkat hingga tahun 2014. Kota Balikpapan kembali mengalami penurunan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2015. , yang berlanjut hingga tahun 2016. Tahun berikutnya, tahun 2017, terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah sebesar 47.563.009.260,52 dengan kontribusi sebesar 3%, dan terus

meningkat hingga tahun 2019 (dan seterusnya). Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga tahun 2022, dengan total pendapatan retribusi daerah kota Balikpapan sebesar 40.132.815.666,50 dengan kontribusi hanya sebesar 1%.

#### 4.1.1.2 Variabel Dependen

##### 4.1.1.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah

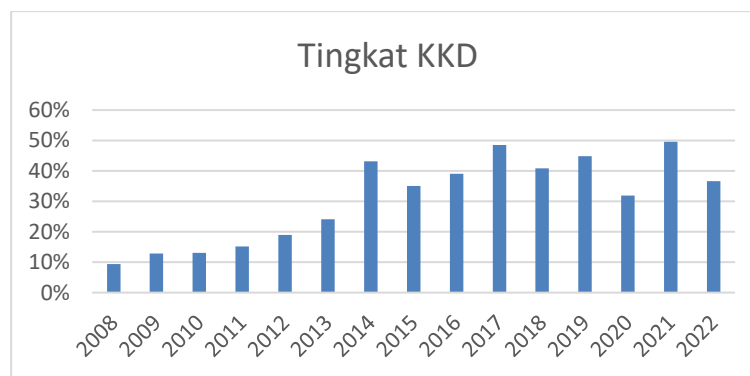
Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besaran bantuan dan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Jumlah gabungan dukungan keuangan federal, negara bagian, dan lokal. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kota Balikpapan mampu menghasilkan pendapatan dari tahun 2008 hingga 2022. Berikut adalah sinopsis kiprah Balikpapan menuju dan mempertahankan kemandirian keuangan daerah selama tahun anggaran 2008-2022.

**Tabel 4.4 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BANTUAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN PINJAMAN	RASIO KEMANDIRIAN	POLA HUBUNGAN
2008	Rp 117.630.283.228	Rp 1.259.051.914.010	9%	INSTRUKTIF
2009	Rp 145.291.731.066	Rp 1.133.983.699.959	13%	INSTRUKTIF
2010	Rp 143.796.987.897	Rp 1.099.483.157.556	13%	INSTRUKTIF
2011	Rp 237.029.073.667	Rp 1.567.313.936.822	15%	INSTRUKTIF
2012	Rp 352.034.256.557	Rp 1.854.369.348.296	19%	INSTRUKTIF
2013	Rp 470.719.063.633	Rp 1.951.492.230.092	24%	INSTRUKTIF
2014	Rp 752.582.581.776	Rp 1.745.957.915.182	43%	KONSULTATIF
2015	Rp 578.959.818.474	Rp 1.651.005.978.744	35%	KONSULTATIF
2016	Rp 560.365.008.676	Rp 1.433.027.897.049	39%	KONSULTATIF
2017	Rp 612.250.040.990	Rp 1.261.716.950.368	49%	KONSULTATIF
2018	Rp 646.868.407.485	Rp 1.583.868.213.748	41%	KONSULTATIF
2019	Rp 764.087.241.241	Rp 1.705.441.251.430	45%	KONSULTATIF
2020	Rp 609.057.640.903	Rp 1.906.450.846.861	32%	KONSULTATIF
2021	Rp 755.062.500.915	Rp 1.523.197.346.275	50%	KONSULTATIF
2022	Rp 735.443.555.936	Rp 2.009.937.406.176	37%	KONSULTATIF

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan (data diolah)

Total sampel ada 15 sampel yang diwakili oleh nilai N pada tabel 4.1. Otonomi keuangan di tingkat daerah berkisar antara 0,09 sampai 0,50, dengan rata-rata 0,3093 dan 0,14200 sebagai standar deviasi antara tahun 2008 dan 2022. Nilai antara 0,09 dan 0,50 dimungkinkan. Karena rata-ratanya lebih besar dari standar deviasinya, sebaran data tentang Kemandirian Keuangan Daerah cukup dekat dengan rata-ratanya. Selain informasi yang telah disajikan sebelumnya, grafik yang disajikan di bawah ini menggambarkan perkembangan sejauh mana kemandirian keuangan daerah yang telah dicapai di Kota Balikpapan dari tahun anggaran 2008 ke tahun anggaran 2022:



**Grafik 4.3 Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022**

*Sumber: Data Sekunder dari BPKPD Balikpapan yang diolah, 2023*

Kota Balikpapan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang fluktuatif, yang digambarkan oleh grafik. Tingkat ini terbukti berubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan mencapai 9%, dan terus meningkat hingga mencapai 43% pada tahun 2014. Sebaliknya angka ini turun menjadi 35% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai angka 49%. Namun penurunan persentasi

mengalami penurunan kembali pada tahun 2018, persentase hanya mencapai 41%. Namun kembali mengalami kenaikan persentase sebesar 45% pada tahun 2019. Dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021, dengan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan sebesar 50%. Dan pada akhirnya pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase kembali menjadi 37%.

#### **4.1.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.1.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bermaksud untuk memutuskan apakah suatu data dapat dikatakan normal atau tidak, dengan membandingkan informasi yang diklaim dengan data punggutan tipikal, yang harus memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama dengan data yang diuji. Dalam penyelidikan ini, uji terukur non-parametrik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. (K-S). Jika distribusi datanya normal atau mendekati normal, model regresinya normal. Hipotesis uji K-S merupakan hipotesis yang perlu diuji, yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_a$  : Data residual berdistribusi tidak normal

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah :

- a) Nilai signifikansi  $\geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- b) Nilai signifikansi  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Berdasarkan pengujian uji K-S melalui SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02083774
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.120
	Negative	-.188
Test Statistic		.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.162 <sup>c</sup>

Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.5 di atas, hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,162, karena angka ini lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena  $H_0$  diterima.

#### 4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel yang dianggap independen atau tidak. Nilai toleransi model regresi dan *Variance Inflation Factor* (VIF) perlu diselidiki untuk memastikan apakah model menunjukkan multikolinieritas atau tidak. Menurut (Ghozali 2016), suatu variabel dianggap bebas dari multikolinieritas jika nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\leq 10$ . Nilai toleransi masing-masing variabel, serta VIF, disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.048	.029		-1.639	.127		
	Pajak Daerah	2.015	.090	.978	22.501	.000	.951	1.052
	Retribusi Daerah	1.473	1.348	.047	1.093	.296	.951	1.052

Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023



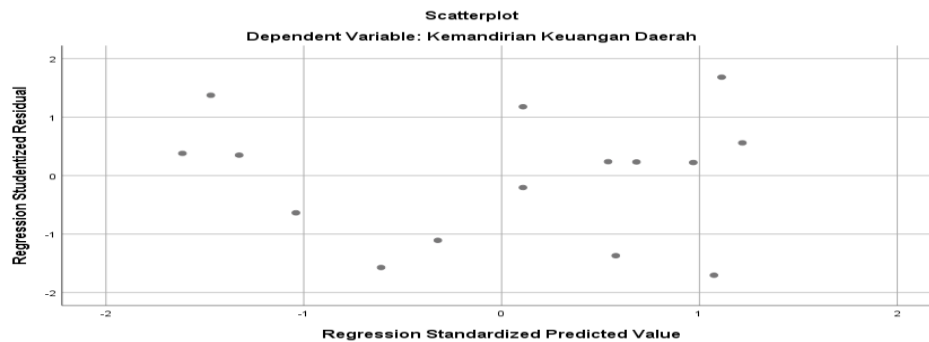
Nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 pada hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini berarti model regresi penelitian tidak memiliki multikolinearitas antar variabel independen.

#### 4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat varians yang tidak sama antara residual dari pengamatan yang berbeda, digunakan uji heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian heteroskedastisitas. Pengecekan pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y merepresentasikan apa yang telah diprediksi dan sumbu X merepresentasikan residual (prediksi Y – Y sebenarnya) yang telah di *studentized*, merupakan salah satu metode untuk menentukan layak atau tidaknya terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang), melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Berikut adalah pemaparan diagram *scatterplot* model regresi pada penelitian ini yang disajikan pada grafik 4.4



**Grafik 4.4 Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023*

Seperti dapat dilihat pada Grafik 4.4, titik-titik ini tidak mengikuti pola tertentu dan tersebar secara acak sepanjang sumbu Y, baik di atas maupun di bawah angka 0 di kedua arah. Oleh karena itu, salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

#### 4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali 2016), uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah kesalahan dari periode sebelumnya ( $t-1$ ) berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode waktu yang sama saat ini sedang diselidiki. Dalam penyelidikan khusus ini, ada tidaknya autokorelasi diselidiki dengan bantuan uji Durbin-Watson. Nilai uji DW disajikan pada tabel berikut yang berisi hasil perhitungan SPSS:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 <sup>a</sup>	.978	.975	.02251	1.633

*Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023*

Nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,633, seperti terlihat pada tabel 4.7 yang memuat hasil pengujian. Ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU dari tabel DW menggunakan tingkat signifikansi yang sama (5%), jumlah sampel (n), dan jumlah variabel bebas (k) yang sama. Penelitian ini menemukan  $dL = 0,9455$  dan  $dU = 1,5432$  untuk ukuran sampel  $k = 2$ , dengan  $n = 15$ . Jika nilai DW yang dihasilkan antara dU (1,5432) dan  $4 - dU$  ( $4 - 1,5432 = 2,4568$ ), maka  $H_0$  diterima.

Karena nilai DW pada tabel 4.4 adalah 1,633 antara dU dan  $4 - dU$  ( $1,5432 < 1,633 < 2,4568$ ), dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah pendekatan analisis data yang digunakan untuk penelitian ini. Menurut (Ghozali 2016), inti dari analisis regresi adalah penelitian tentang hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Penelitian ini dapat dilakukan dengan satu atau lebih variabel terikat. Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda ditampilkan dalam tabel berikut, yang dihasilkan oleh program SPSS dan digunakan untuk memperkirakan regresi linier berganda:

**Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.048	.029		-1.639	.127
	Pajak Daerah	2.015	.090	.978	22.501	.000
	Retribusi Daerah	1.473	1.348	.047	1.093	.296

Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian model regresi tersebut, maka model regresi yang menyatakan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan di nyatakan sebagai berikut:

$$Y = -0,048 + 2,015X_1 + 1,473X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Kemandirian Daerah  
 X<sub>1</sub> : Pajak Daerah  
 X<sub>2</sub> : Retribusi Daerah  
 A : Konstanta  
 b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi  
 e : Error

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta negatif 0,048. Nilai variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan akan turun sebesar 0,048% jika pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan retribusi daerah (X<sub>2</sub>) dianggap nol (0).
2. Nilai koefisien regresi pajak daerah sebesar 2,015 dan bernilai positif. Artinya jika variabel lain tetap sama, peningkatan kemandirian keuangan daerah yang disebabkan oleh kenaikan pajak daerah sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 2,015%.
3. Nilai koefisien regresi untuk retribusi daerah sebesar 1,473, dan bertanda positif artinya jika variabel lain tetap sama, Untuk mencapai otonomi fiskal sebesar 1,473%, diperlukan kenaikan retribusi daerah sebesar 1%. Hal ini dikarenakan nilai koefisien regresi retribusi daerah bertanda positif.

#### 4.1.4 Uji Hipotesis

##### 4.1.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi model adalah bagaimana seseorang menentukan apakah model tersebut mampu menjelaskan secara memadai pergeseran yang diamati dalam variabel dependen. ( $R^2$ ). Koefisien determinasi dapat mengambil nilai antara 0 sampai dengan 1 yang dilambangkan dengan range  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Jika nilai  $R^2$  relatif mendekati satu maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh signifikan pada yang terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat prediksi akurat dari variabel dependen dapat ditemukan pada variabel independen. (Ghozali, 2016). Adjusted R-Square atau metode berdasarkan jumlah variabel independen digunakan untuk menguji koefisien determinasi.

**Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 <sup>a</sup>	.978	.975	.02251

*Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 korelasi atau hubungan antara variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah dengan variabel terikat kemandirian keuangan daerah adalah kuat sebesar 0,989. Hal ini dikarenakan nilainya yang sangat dekat dengan angka 1 yang menandakan bahwa korelasi atau hubungannya kuat. Hal ini disebabkan angka R relatif mendekati angka 1. Berdasarkan nilai R Square sebesar 0,978 maka pajak dan retribusi daerah merupakan faktor penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu otonomi fiskal daerah Kota Balikpapan

sebesar 97,8%. Variabel lain memengaruhi sisa 2,2% dari varians, yang tidak dapat dijelaskan di sini.

#### 4.1.4.2 Uji Statistik F (Uji F)

Tingkat signifikansi pengaruh independen secara bersamaan (sekaligus) terhadap variabel dependen dihitung dengan uji F. Dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan derajat kepercayaan signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka teknik pengambilan keputusan uji F dapat dilaksanakan. Keputusan tentang uji statistik F didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Nilai signifikansi  $\geq \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- 2) Nilai signifikansi  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

$H_0$  :Tidak adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

$H_a$  :Adanya pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

**Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F (Simultan)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.276	2	.138	272.627	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.006	12	.001		
	Total	.282	14			

Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar  $272,627 >$  dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu 3,68 atau dengan tingkat signifikansi F sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterma. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas

yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### 4.1.4.3 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tujuan uji t statistik adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari setiap variabel independen dalam menjelaskan varians total dalam variabel dependen. Statistik t digunakan untuk menguji hubungan antara pajak dan retribusi daerah dengan variabel dependen otonomi keuangan daerah kota Balikpapan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kepastian 0,05. Hasil pemeriksaan ini akan didasarkan pada kriteria berikut:

- Tingkat signifikansi  $< 5\%$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa terdapat pengaruh.
- Tingkat signifikansi  $> 5\%$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh.

Pengujian ini menggunakan hasil uji statistik t yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t (Parsial)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	-.048	.029		-1.639	.127
	Pajak Daerah	2.015	.090	.978	22.501	.000
	Retribusi Daerah	1.473	1.348	.047	1.093	.296

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil output IBM SPSS 25, data sekunder diolah 2023

#### 1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan

Dengan melihat tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima. Dimana nilai  $t_{hitung}$  pajak daerah yang diperoleh sebesar 22,501, angka tersebut lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,131. Sedangkan interval

kepercayaan  $0,05 \geq 0,000$ . Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan**

Dengan melihat tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dimana nilai  $t_{hitung}$  retribusi daerah yang diperoleh sebesar 1,093, angka tersebut lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,131. Sedangkan interval kepercayaan  $0,05 \leq 0,296$ . Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan**

Hipotesis pertama yang dikemukakan menunjukkan bahwa tingkat pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan. Karena nilai signifikansi yang diperoleh uji statistik  $t$  lebih rendah dari nilai  $\alpha$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel pajak daerah. Konsekuensinya, pernyataan  $H_0$  bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah dapat diterima.

Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Balqis et al. (2018), penulis menemukan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu,



penelitian Maya dan Lita (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berperan penting dalam menentukan kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Feni dan Faris (2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling signifikan bagi kota Balikpapan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terlihat jelas bahwa kontribusi tahunan penerimaan pajak daerah lebih tinggi daripada kontribusi retribusi daerah. Ini merupakan kasus untuk sebagian besar setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah Kota Balikpapan yang cukup besar menjadi sumber kontribusi pajak daerah yang cukup besar. Antara tahun 2008 dan 2022, Kota Balikpapan mengalami perubahan positif berupa peningkatan realisasi pajak daerah setiap tahunnya sebagai hasil dari perubahan positif tersebut. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan redistribusi pendapatan pajak daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh pemerintah pusat, kini dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan pajak daerah yang tinggi dapat menunjukkan keunggulan sumber daya, yang berasal dari pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, batuan mineral dan bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menunjukkan bahwa Balikpapan memiliki sumber daya

dan kesadaran perpajakan yang cukup untuk menghasilkan penerimaan pajak yang cukup besar.

Besarnya penerimaan pajak daerah dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, semakin besar penerimaan pajak suatu daerah, maka semakin besar pula PAD yang diterima. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat meningkat akibat kemampuan PAD yang lebih rendah untuk mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi faktor yang di kemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014), yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah. Selain itu, ketergantungan suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika PAD yang dihasilkan tinggi.

#### **4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan**

Hipotesis kedua, bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti salah di kota Balikpapan. Untuk uji-t, tingkat signifikansi berada di atas ambang signifikansi statistik ( $\alpha$ ). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh variabel retribusi daerah. Konsekuensinya, pernyataan  $H_a$  bahwa retribusi daerah berdampak pada kemandirian keuangan daerah ditolak.

Balqis dkk. (2018) menemukan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi otonomi keuangan daerah. Beni dkk. (2018) menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap otonomi keuangan daerah. Penelitian ini bertentangan dengan Maya dan Lita (2019) dan lainnya yang menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. kemampuan untuk mempertahankan otonomi keuangannya.

Upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sebagai objek pungutan daerah dapat menjadi sumber penerimaan pungutan daerah yang potensial. Melalui pemberian alternatif keuangan berupa pendapatan kas daerah, tujuan pemungutan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyadaran masyarakat tentang perlunya menaikkan retribusi daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. sehingga perbedaan hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan perbedaan besaran partisipasi masyarakat daerah, kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang pemungutan retribusi daerah, dan jumlah barang yang dipungut.

Penerimaan retribusi daerah di Kota Balikpapan dari tahun 2008-2022 sangatlah fluktuatif dan penerimannya yang dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan pajak daerah. Berdasarkan total retribusi daerah dibandingkan dengan total pajak yang diperoleh terdapat selisih yang cukup besar hingga mencapai angka sebesar Rp 4.728.102.314.619,60, sehingga dapat diartikan bahwa Kota Balikpapan belum dapat memaksimalkan

pendapatan retribusi di kota tersebut. Di Kota Balikpapan penerimaan retribusi masih dianggap rendah dan jauh dari kata mandiri. Retribusi daerah yang diperoleh dari retribusi jasa umum dan usaha serta retribusi jasa, retribusi pemeriksaan dan pengujian, retribusi tempat umum, retribusi perijinan tertentu, dan retribusi pembangunan gedung. Kurangnya kesadaran akan kewajiban membayar retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi dan masih banyaknya permasalahan retribusi yang sering terjadi di daerah menjadi kendala yang dihadapi pemerintah kota Balikpapan dalam upaya melaksanakannya. Keluar fungsi pemungut retribusi daerah. Kendala tersebut membuat pemerintah kota kesulitan menjalankan fungsinya. Misalnya masalah tarif parkir, khususnya retribusi jalan umum dan parkir pasar tradisional, yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Pemungut retribusi yang menggunakan hasil retribusi untuk keuntungan pribadi membuat peraturan pemerintah daerah menjadi tidak bermakna. Sehingga hasil retribusi tidak sesuai anggaran dan mempengaruhi pembelian PAD.

#### **4.2.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan**

Berdasarkan hipotesis ketiga yang diajukan, penerimaan kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan dipengaruhi secara signifikan baik oleh pajak daerah maupun retribusi daerah yang berlaku secara bersamaan. Nilai signifikansi uji  $f$  lebih kecil dari nilai  $\alpha$  menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap

kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis  $H_a$  bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah diterima.

Hasil serupa ditemukan oleh Febriyanti dan Faris (2019), yang menemukan bahwa kombinasi pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di kota Balikpapan tahun anggaran 2008-2022 cukup baik dinilai dari rasio kemandirian keuangan daerah yang didapat setiap tahunnya, dengan rata-rata persentase sebesar 34%. Dengan nilai rasio rata-rata tersebut dapat dikatakan bahwa pola hubungan kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan konsultif, yang artinya bahwa mulai berkurangnya campur tangan dari pemerintah pusat serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini disebabkan karena kota Balikpapan sudah dianggap mampu untuk membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri dalam hal kegiatan pemerintahan.

Pajak daerah dan retribusi di kota Balikpapan mempunyai peran penting dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan di kota Balikpapan. Salah satu faktor pendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah yaitu para wajib pajak baik perorangan maupun badan yang sudah melakukan kewajiban penyeteroran pajak, sehingga optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008-2022, maka hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan, kontribusi pajak daerah kota Balikpapan yang tinggi dianggap dapat menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah di kota tersebut.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan, kontribusi retribusi daerah kota Balikpapan rendah dianggap belum dapat menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah di kota tersebut.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Balikpapan, berdasarkan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah kota Balikpapan agar meningkatkan lagi pendapatan retribusi daerah, dengan melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemungutan liar.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada objek yang lebih besar, memperpanjang periode waktu, dan memasukkan variabel tambahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balqis. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013 – 2017. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 34–49. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.65>
- Barlina, B., Herawati, & Ethika. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Povinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016).
- Bungin, Burhan. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Dermawan, Deni. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ghozali, I. dan Chairiri, A. (2014). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivaririate dengan Program SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A., & Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Keem). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. (Edisi keenam). Salemba Empat.
- Halim, & Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dab Manajemen Keuanga Daerah*.
- Marizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2011. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang.
- Martono, Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Rajawali Pers
- Maya, & Lita. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Mukarramah, Hibibatul. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



- Nggilu, Fadly., Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16, No. 4 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi
- Novalistia, Rizka Lutfita. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.*
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.*
- Putro, P. U. W. (2013). *Pengaruh Pdrb Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan Pad Sebagai Variabel Intervening.*
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers
- Suratinoyo, A. K. A., Sabijono, H., & Alexander, S. (2013). *Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika

# **LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2008

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.351.895.098.798,07</b>	<b>1.376.682.197.238,06</b>	<b>-24.787.098.439,99</b>	<b>101,83</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>102.347.521.798,07</b>	<b>117.630.283.228,06</b>	<b>-15.282.761.429,99</b>	<b>114,93</b>
Hasil Pajak Daerah	60.071.425.836,00	65.199.182.740,90	-5.127.756.904,90	108,53
Hasil Retribusi Daerah	25.155.783.955,00	26.260.782.381	-1.104.998.426,78	104,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.239.733.193,60	7.239.733.193,60	-	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.880.578.813,47	18.930.584.911,78	-9.050.006.098,31	191,59
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>977.127.802.000,00</b>	<b>962.052.674.810,00</b>	<b>15.075.127.190,00</b>	<b>98,45</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	795.136.610.000,00	780.061.482.810,00	15.075.127.190,00	98,1
Dana Alokasi Umum	174.390.192.000,00	174.390.192.000,00	-	100
Dana Alokasi Khusus	7.601.000.000,00	7.601.000.000,00	-	100
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>272.419.775.000,00</b>	<b>296.999.239.200,00</b>	<b>-24.579.464.200,00</b>	<b>109,02</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	109.719.775.000,00	130.264.411.000,00	-20.544.636.000,00	118,72
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	162.700.000.000,00	162.700.000.000,00	-	100
Dana Tunjangan Kependidikan	-	4.034.828.200,00	-4.034.828.200,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.351.895.098.798,07</b>	<b>1.376.682.197.238,06</b>	<b>-24.787.098.439,99</b>	<b>101,83</b>

**Lampiran 2 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2009**

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2009**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.409.812.021.935,00</b>	<b>1.279.275.431.024,95</b>	<b>130.536.590.910,05</b>	<b>90,74</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>119.738.562.095,00</b>	<b>145.291.731.065,95</b>	<b>-25.553.168.970,95</b>	<b>121,34</b>
Hasil Pajak Daerah	65.636.286.070,00	76.186.347.295,00	-1.055.006.125,00	116,07
Hasil Retribusi Daerah	26.749.021.625,00	27.713.514.688,00	-964.493.063,00	103,6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.785.000.000,00	8.786.622.538,30	-1.622.538,30	100,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.568.254.400,00	32.605.246.544,65	-14.036.992.144,65	175,59
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>906.255.282.840,00</b>	<b>808.882.541.269,00</b>	<b>97.372.741.571,00</b>	<b>89,25</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	694.814.392.840,00	597.442.458.269,00	97.371.934.571,00	85,98
Dana Alokasi Umum	176.848.890.000,00	176.848.083.000,00	807.000,00	99,99
Dana Alokasi Khusus	34.592.000.000,00	34.592.000.000,00	-	100
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>383.818.177.000,00</b>	<b>325.101.158.690,00</b>	<b>58.717.018.310,00</b>	<b>84,7</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	143.799.946.000,00	98.067.027.690,00	45.732.918.310,00	68,19
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	9.015.900.000,00	-9.015.900.000,00	90,83
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	240.018.231.000,00	218.018.231.000,00	22.000.000.000,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.409.812.021.935,00</b>	<b>1.279.275.431.024,95</b>	<b>130.536.590.910,05</b>	<b>90,74</b>

**Lampiran 3** Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2010

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2010**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.308.932.690.416,00</b>	<b>1.243.280.145.452,69</b>	<b>-65.652.544.963,31</b>	<b>-5,02</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>130.345.817.293,00</b>	<b>143.796.987.896,69</b>	<b>13.451.170.603,69</b>	<b>10,32</b>
Hasil Pajak Daerah	79.912.849.921,00	88.442.340.406,00	8.529.490.485,00	10,67
Hasil Retribusi Daerah	31.320.124.972,00	29.083.290.115,00	-2.236.834.857,00	-7,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.385.000.000,00	7.386.370.494,94	1.370.494,94	0,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1 1.727.842.400,00	18.884.986.880,75	7.157.144.460,75	61,03
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>860.955.026.958,00</b>	<b>844.535.994.856,00</b>	<b>-16.419.032.102,00</b>	<b>-1,91</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	777.474.304.958,00	761.055.272.856,00	-16.419.032.102,00	-2,11
Dana Alokasi Umum	76.988.322.000,00	76.988.322.000,00		-
Dana Alokasi Khusus	6.492.400.000,00	6.492.400.000,00	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>317.631.846.165,00</b>	<b>254.947.162.700,00</b>	<b>-62.684.683.465,00</b>	<b>-19,74</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	163.281.466.965,00	103.498.133.500,00	-59.783.333.465,00	-36,61
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	53.997.579.200,00	51.096.229.200,00	-2.901.350.000,00	-5,37
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	100.352.800.000,00	100.352.800.000,00	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.308.932.690.416,00</b>	<b>1.243.280.145.452,69</b>	<b>-65.652.544.963,31</b>	<b>-5,02</b>

## Lampiran 4 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2011

## LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

## TAHUN ANGGARAN 2011

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.620.508.777.538,44</b>	<b>1.804.343.010.488,77</b>	<b>183.834.232.950,33</b>	<b>111,34</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>237.029.073.666,77</b>	<b>37.029.073.666,77</b>	<b>118,51</b>
Hasil Pajak Daerah	143.584.347.507,32	170.370.071.078,00	26.785.723.570,68	118,66
Hasil Retribusi Daerah	28.147.271.394,00	27.322.311.854,00	-824.959.540,00	97,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.875.961.842,68	9.875.961.842,68	-	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.392.419.256,00	29.460.728.892,09	11.068.309.636,09	160,18
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.020.920.490.660,00</b>	<b>1.151.703.793.532,00</b>	<b>130.783.302.872,00</b>	<b>112,81</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	744.856.202.660,00	875.545.969.532,00	130.689.766.872,00	117,55
Dana Alokasi Umum	268.135.688.000,00	268.229.224.000,00	93.536.000,00	100,03
Dana Alokasi Khusus	7.928.600.000,00	7.928.600.000,00	-	100
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>399.588.286.878,44</b>	<b>415.610.143.290,00</b>	<b>16.021.856.411,56</b>	<b>104,01</b>
Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	167.524.655.478,44	192.223.656.000,00	24.699.000.521,56	114,74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	87.824.781.400,00	88.147.637.290,00	322.855.890,00	100,37
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	141.238.850.000,00	132.238.850.000,00	-9.000.000.000,00	93,63
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.620.508.777.538,44</b>	<b>1.804.343.010.488,77</b>	<b>183.834.232.950,33</b>	<b>111,34</b>

**Lampiran 5** Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2012**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.950.225.268.226,19</b>	<b>2.206.403.604.853,17</b>	<b>256.178.336.626,98</b>	<b>113,14</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>303.983.530.207,00</b>	<b>352.034.256.557,17</b>	<b>48.050.726.350,17</b>	<b>115,81</b>
Hasil Pajak Daerah	235.170.966.501	261.380.972.015,37	26.210.005.514,37	111,15
Hasil Retribusi Daerah	37.849.480.240,00	43.791.684.142,77	5.942.203.902,77	115,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.191.116.874,00	13.191.116.874,76	0,76	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.771.966.592,00	33.670.483.524,27	1.898.516.932,27	189,46
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.130.891.282.606,00</b>	<b>1.339.024.155.296,00</b>	<b>208.132.872.690,00</b>	<b>118,4</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	732.346.736.606,00	940.479.609.296,00	208.132.872.690,00	128,42
Dana Alokasi Umum	385.085.246.000,00	385.085.246.000,00	-	100
Dana Alokasi Khusus	13.459.300.000,00	13.459.300.000,00	-	100
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>515.350.455.413,19</b>	<b>515.345.193.000,00</b>	<b>-5.262.413,19</b>	<b>100</b>
Pendapatan Hibah	0	0	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	219.695.602.413,19	219.690.340.000,00	-5.262.413,19	100
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	63.214.153.000,00	63.214.153.000,00	-	100
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	232.440.700.000,00	232.440.700.000,00	-	100
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.950.225.268.226,19</b>	<b>2.206.403.604.853,17</b>	<b>256.178.336.626,98</b>	<b>113,14</b>

**Lampiran 6** Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.214.991.437.841,00</b>	<b>2.422.211.293.724,97</b>	<b>207.219.855.883,97</b>	<b>9,36</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>354.840.272.692,00</b>	<b>470.719.063.632,97</b>	<b>115.878.790.940,97</b>	<b>32,66</b>
Hasil Pajak Daerah	262.423.628.135,00	340.998.751.947,69	78.575.123.812,69	29,94
Hasil Retribusi Daerah	51.248.954.189,00	57.381.026.799,94	6.132.072.610,94	11,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.190.000.000,00	17.191.752.156,80	1.752.156,80	0,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.977.690.368,00	55.147.532.728,54	31.169.842.360,54	130
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.173.881.648.321,00</b>	<b>1.281.536.428.792,00</b>	<b>107.654.780.471,00</b>	<b>9,17</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	723.561.592.321	831.216.372.792,00	107.654.780.471,00	14,88
Dana Alokasi Umum	427.133.126.000,00	427.133.126.000,00	-	0
Dana Alokasi Khusus	23.186.930.000,00	23.186.930.000,00	-	0
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>- 686.269.516.828,00</b>	<b>669.955.801.300,00</b>	<b>-16.313.715.528,00</b>	<b>-2,38</b>
Pendapatan Hibah	4.400.000.000,00	0	-4.400.000.000,00	-100
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	346.488.590.800,00	336.773.634.300,00	-9.714.956.500,00	-2,8
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	95.822.126.028,00	93.623.367.000,00	-2.198.759.028,00	-2,29
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	239.558.800.000,00	239.558.800.000,00	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.214.991.437.841,00</b>	<b>2.422.211.293.724,97</b>	<b>207.219.855.883,97</b>	<b>9,36</b>



## Lampiran 7 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014

## LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

## TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/KURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.243.422.215.087,00</b>	<b>2.498.540.496.958,47</b>	<b>255.118.281.871</b>	<b>111,37</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>638.630.681.123,00</b>	<b>752.582.581.776,47</b>	<b>113.951.900.653,47</b>	<b>117,84</b>
Hasil Pajak Daerah	496.803.855.927,00	575.567.514.291,74	78.763.658.364,74	115,85
Hasil Retribusi Daerah	59.547.489.715,00	68.312.178.262,58	8.764.688.547,58	114,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.000.000.000,00	18.557.696.204,15	-3.442.303.795,85	84,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.279.335.481	90.145.193.018,00	29.865.857.537,00	149,55
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.176.771.223.989,00</b>	<b>1.321.528.732.432,00</b>	<b>144.757.508.443,00</b>	<b>112,3</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	718.799.721.989,00	863.557.230.432,00	144.757.508.443,00	120,14
Dana Alokasi Umum	449.982.262.000,00	449.982.262.000,00	-	100
Dana Alokasi Khusus	7.989.240.000,00	7.989.240.000,00	-	100
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>- 686.269.516.828,00</b>	<b>424.429.182.750,00</b>	<b>-3.591.127.225,00</b>	<b>99,16</b>
Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	3.830.000.000,00	-4.170.000.000,00	47,88
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	211.256.756.000,00	210.276.878.775,00	-979.877.225,00	99,54
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	106.432.639.000,00	107.991.389.000,00	1.558.750.000,00	101,46
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	102.330.914.975,00	102.330.914.975,00	-	100
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.243.422.215.087,00</b>	<b>2.498.540.496.958,47</b>	<b>255.118.281.871</b>	<b>111,37</b>

Lampiran 8 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2015	Audited 2015	Realisasi 2014
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.529.001.945.784,00</b>	<b>2.229.965.797.217,84</b>	<b>2.498.540.496.958,47</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>539.892.356.090,00</b>	<b>578.959.818.473,84</b>	<b>752.582.581.776,47</b>
Pendapatan Pajak Daerah	353.408.000.000,00	385.432.289.529,31	575.567.514.291,74
Pendapatan Retribusi Daerah	54.013.679.440,00	48.132.803.944,63	68.312.178.262,58
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.560.000.000,00	25.716.622.557,65	18.557.696.204,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.910.676.650,00	119.678.102.442,25	90.145.193.018,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.984.609.589.694,00</b>	<b>1.649.820.978.744,00</b>	<b>1.742.127.915.182,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.430.910.142.069,00</b>	<b>1.145.301.044.119,00</b>	<b>1.321.528.732.432,00</b>
Bagi Hasil Pajak	198.674.405.000,00	125.038.354.850,00	172.308.144.389,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	832.169.871.069,00	622.563.917.269,00	691.249.086.043,00
Dana Alokasi Umum	388.230.396.000,00	388.230.396.000,00	449.982.262.000,00
Dana Alokasi khusus	11.835.470.000,00	9.468.376.000,00	7.989.240.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>146.023.971.000,00</b>	<b>146.023.971.000,00</b>	<b>107.991.389.000,00</b>
Dana Penyesuaian	146.023.971.000,00	146.023.971.000,00	107.991.389.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>407.675.476.625,00</b>	<b>358.495.963.625,00</b>	<b>312.607.793.750,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	252.545.976.625,00	222.438.963.625,00	210.276.878.775,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	155.129.500.000,00	136.057.000.000,00	102.330.914.975,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>1.185.000.000,00</b>	<b>3.830.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	1.185.000.000,00	3.830.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.529.001.945.784,00</b>	<b>2.229.965.797.217,84</b>	<b>2.498.540.496.958,47</b>

Lampiran 9 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2016	Realisasi 2016 (Audited)	( % )	Realisasi 2015
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.234.750.897.296,11</b>	<b>1.993.392.905.725,29</b>	<b>89,20</b>	<b>2.229.965.797.217,84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>555.970.991.413,00</b>	<b>560.365.008.676,29</b>	<b>100,79</b>	<b>578.959.818.473,84</b>
Pendapatan Pajak Daerah	393.608.000.000,00	403.690.047.708,65	102,56	385.432.289.529,31
Pendapatan Retribusi Daerah	51.300.972.013,00	46.624.692.440,79	90,88	48.132.803.944,63
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.084.723.650,00	15.051.835.627,69	99,78	25.716.622.557,65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.977.295.750,00	94.998.432.899,16	98,98	119.678.102.442,25
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.675.779.905.883,11</b>	<b>1.427.957.897.049,00</b>	<b>85,21</b>	<b>1.649.820.978.744,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.265.362.336.883,11</b>	<b>1.066.561.649.134,00</b>	<b>84,29</b>	<b>1.145.301.044.119,00</b>
Bagi Hasil Pajak	177.129.243.000,00	142.907.891.921,00	80,68	125.038.354.850,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	609.805.540.883,11	457.744.385.992,00	75,06	622.563.917.269,00
Dana Alokasi Umum	391.898.857.000,00	391.898.857.000,00	100,00	388.230.396.000,00
Dana Alokasi khusus	86.528.696.000,00	74.010.514.221,00	85,53	9.468.376.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>125.395.700.000,00</b>	<b>76.374.378.915,00</b>	<b>60,91</b>	<b>146.023.971.000,00</b>
Dana Penyesuaian	125.395.700.000,00	76.374.378.915,00	60,91	146.023.971.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>285.021.869.000,00</b>	<b>285.021.869.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>358.495.963.625,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	181.980.819.000,00	181.980.819.000,00	100,00	222.438.963.625,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	103.041.050.000,00	103.041.050.000,00	100,00	136.057.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>5.070.000.000,00</b>	<b>169,00</b>	<b>1.185.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	5.070.000.000,00	169,00	1.185.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.234.750.897.296,11</b>	<b>1.993.392.905.725,29</b>	<b>89,20</b>	<b>2.229.965.797.217,84</b>

## Lampiran 10 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan 2017</b>	<b>Realisasi 2017 (Audited)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2016</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.938.309.743.312,00</b>	<b>1.873.966.991.358,01</b>	<b>96,68</b>	<b>1.993.392.905.725,29</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>568.575.283.786,00</b>	<b>612.250.040.990,01</b>	<b>107,68</b>	<b>560.365.008.676,29</b>
Pendapatan Pajak Daerah	4 19.000.000.000,00	450.213.740.232,52	107,45	403.690.047.708,65
Pendapatan Retribusi Daerah	46.420.013.978,00	47.563.009.260,52	102,46	46.624.692.440,79
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.260.000.000,00	15.163.120.190,93	93,25	15.051.835.627,69
Lain-lain PAD yang sah	86.895.269.808,00	99.310.171.306,04	11,9	94.998.432.899,16
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.367.134.459.526,00</b>	<b>1.259.322.950.368,00</b>	<b>2,11</b>	<b>1.427.957.897.049,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>922.960.601.526,00</b>	<b>817.394.319.468,00</b>	<b>88,56</b>	<b>1.066.561.649.134,00</b>
Bagi Hasil Pajak	183.156.977.000,00	143.138.978.011,00	78,15	142.907.891.921,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	257.260.979.526,00	220.016.427.595,00	85,52	457.744.385.992,00
Dana Alokasi Umum	392.620.000.000,00	392.621.094.000,00	100	391.898.857.000,00
Dana Alokasi khusus	89.922.645.000,00	61.617.819.862,00		74.010.514.221,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>157.372.739.000,00</b>	<b>152.578.941.900,00</b>	<b>96,95</b>	<b>76.374.378.915,00</b>
Dana Penyesuaian	157.372.739.000,00	152.578.941.900,00	6,95	76.374.378.915,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>286.801.119.000,00</b>	<b>289.349.689.000,00</b>	<b>100,99</b>	<b>285.021.869.000,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	234.528.619.000,00	237.077.189.000,00	101,09	181.980.519.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	52.272.500.000,00	52.272.500.000,00	100,00	103.041.050.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>2.600.000.000,00</b>	<b>2.394.000.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>5.070.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.600.000.000,00	2.394.000.000,00	92,08	5.070.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.938.309.743.312,00</b>	<b>1.873.966.991.358,01</b>	<b>96,68</b>	<b>1.993.392.905.725,29</b>

## Lampiran 11 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan 2018</b>	<b>Realisasi 2018 (Audited)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2017</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.227.832.853.277,00</b>	<b>2.230.736.621.233,10</b>	<b>100,13</b>	<b>1.873.966.991.358,01</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>678.500.000.000,00</b>	<b>646.868.407.485,10</b>	<b>95,34</b>	<b>612.250.040.990,01</b>
Pendapatan Pajak Daerah	491.114.106.750,00	474.455.854.717,30	96,61	450.213.740.232,52
Pendapatan Retribusi Daerah	70.885.893.250,00	55.054.750.772,39	77,67	47.563.009.260,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.500.000.000,00	14.360.001.940,84	77,62	15.163.120.190,93
Lain-lain PAD yang sah	98.000.000.000,00	102.997.800.054,57	105,09	99.310.171.306,04
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.546.332.853.277,00</b>	<b>1.580.568.213.748,00</b>		<b>1.259.322.950.368,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.035.431.481.277,00</b>	<b>1.096.230.492.809,00</b>	<b>105,87</b>	<b>817.394.319.468,00</b>
Bagi Hasil Pajak	158.569.738.666,00	123.953.578.235,00	78,17	143.138.978.011,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	366.153.396.611,00	469.470.265.663,00	128,22	220.016.427.595,00
Dana Alokasi Umum	410.543.293.000,00	410.543.293.000,00	100,00	392.621.094.000,00
Dana Alokasi khusus	100.165.053.000,00	92.263.355.911,00	92,11	61.617.819.862,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>187.389.676.000,00</b>	<b>167.488.330.939,00</b>	<b>89,38</b>	<b>152.578.941.900,00</b>
Dana Penyesuaian	187.389.676.000,00	167.488.330.939,00	89,38	152.578.941.900,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>323.511.696.000,00</b>	<b>316.849.390.000,00</b>	<b>97,94</b>	<b>289.349.689.000,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	272.682.284.000,00	266.019.978.000,00	97,56	237.077.189.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	50.829.412.000,00	50.829.412.000,00	100	52.272.500.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>2.394.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	110	2.394.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.227.832.853.277,00</b>	<b>2.230.736.621.233,10</b>	<b>100,13</b>	<b>1.873.966.991.358,01</b>

## Lampiran 12 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN****TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan 2019</b>	<b>Realisasi 2019 (Audited)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2018</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.527.027.291.918,00</b>	<b>2.469.528.492.671,23</b>	<b>97,72</b>	<b>2.230.736.621.233,10</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>688.424.448.700,00</b>	<b>764.087.241.241,05</b>	<b>110,99</b>	<b>646.868.401.485,10</b>
Pendapatan Pajak Daerah	501.950.000.000,00	565.236.192.479,07	112,61	474.455.854.717,30
Pendapatan Retribusi Daerah	69.023.618.000,00	55.680.497.069,87	80,67	55.054.750.772,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.100.000.000,00	16.870.674.739,20	119,65	14.360.001.940,84
Lain-lain PAD yang sah	103.350.830.700,00	126.299.876.952,91	122,2	102.997.800.054,57
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.835.602.843.218,00</b>	<b>1.702.441.251.430,18</b>	<b>92,75</b>	<b>1.580.568.213.748,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.167.112.811.353,00</b>	<b>1.061.676.408.488,00</b>	<b>90,97</b>	<b>1.096.230.492.809,00</b>
Bagi Hasil Pajak	108.964.295.000,00	68.155.340.656,00	62,55	123.953.578.235,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	502.771.697.353,00	456.723.178.388,00	90,84	469.470.265.663,00
Dana Alokasi Umum	445.818.661.000,00	439.818.664.000,00	98,65	410.543.293.000,00
Dana Alokasi khusus	109.558.158.000,00	96.979.225.444,00	88,52	92.263.355.911,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>189.951.578.000,00</b>	<b>185.455.780.904,18</b>	<b>97,63</b>	<b>167.488.330.939,00</b>
Dana Penyesuaian	189.951.578.000,00	185.455.780.904,18	97	167.488.330.939,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>478.538.453.865,00</b>	<b>455.309.062.038,00</b>	<b>95,15</b>	<b>316.849.390.000,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	321.988.453.865,00	298.759.062.038,00	92,79	266.019.978.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100	50.829.412.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.300.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.527.027.291.918,00</b>	<b>2.469.528.492.671,23</b>	<b>97,72</b>	<b>2.230.736.621.233,10</b>

## Lampiran 13 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan 2020</b>	<b>Realisasi 2020 (Audited)</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/Kurang</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.084.616.352.502,00</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>	<b>120,67</b>	<b>2.469.528.492.671,23</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>471.519.353.613,00</b>	<b>609.057.640.903,42</b>	<b>129,17</b>	<b>764.087.241.241,05</b>
Pendapatan Pajak Daerah	331.500.000.000,00	425.129.773.688,60	128,24	565.236.192.479,07
Pendapatan Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	49.272.540.221,33	114,28	55.680.497.069,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.167.354.650,00	16.174.599.738,41	100,04	16.870.674.739,20
Lain-lain PAD yang sah	80.737.869.063,00	118.480.727.255,08	146,75	126.299.876.952,91
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.534.125.698.889,00</b>	<b>1.830.196.140.055,00</b>	<b>119,3</b>	<b>1.702.441.251.430,18</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.132.507.129.889,00</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>	<b>125,22</b>	<b>1.061.676.408.488,00</b>
Bagi Hasil Pajak	160.993.754.889,00	147.855.851.617,00	91,84	68.155.340.656,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	384.515.020.000,00	678.037.692.130,00	176,34	456.723.178.388,00
Dana Alokasi Umum	437.726.788.000,00	429.199.860.000,00	98,05	439.818.664.000,00
Dana Alokasi khusus	149.271.567.000,00	163.060.712.142,00	109,24	96.979.225.444,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>60.630.542.000,00</b>	<b>71.303.699.000,00</b>	<b>117,6</b>	<b>185.455.780.904,18</b>
Dana Penyesuaian	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,6	185.455.780.904,18
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>340.988.027.000,00</b>	<b>340.738.325.166,00</b>	<b>99,93</b>	<b>455.309.062.038,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	231.193.027.000,00	230.943.325.166,00	99,89	298.759.062.038,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100	156.550.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>78.971.300.000,00</b>	<b>76.254.706.805,72</b>	<b>96,56</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	78.971.300.000,00	75.971.158.567,00	96,2	3.000.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Masyarakat	0	283.548.238,72	-	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>471.519.353.613,00</b>	<b>609.057.640.903,42</b>	<b>129,17</b>	<b>764.087.241.241,05</b>

## Lampiran 14 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN****TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2021	Realisasi 2021 (Audited)	( % )	Realisasi 2020
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>675.712.743.600,00</b>	<b>755.062.500.914,79</b>	<b>111,74</b>	<b>606.079.950.753,42</b>
Pendapatan Pajak Daerah	515.000.000.000,00	537.494.991.847,32	104,37	425.129.773.688,60
Pendapatan Retribusi Daerah	48.441.770.600,00	43.879.656.032,77	90,58	49.285.693.721,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.800.000.000,00	17.906.485.028,05	95,25	16.174.599.738,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.470.973.000,00	155.781.368.006,65	166,66	115.489.883.605,08
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.466.659.901.924,00</b>	<b>1.443.258.420.222,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.830.196.140.055,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>985.002.895.924,00</b>	<b>980.884.290.332,00</b>	<b>99,58</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>
Bagi Hasil Pajak	134.565.451.428,00	107.657.869.991,00	80,00	147.855.851.617,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	236.060.509.496,00	294.774.240.705,00	124,87	678.037.692.130,00
Dana Alokasi Umum	428.306.693.000,00	428.306.693.000,00	100,00	429.199.860.000,00
Dana Alokasi khusus	186.070.242.000,00	150.145.486.636,00	80,69	163.060.712.142,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>84.211.816.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.303.699.000,00</b>
Dana Penyesuaian	84.211.816.000,00	84.211.816.000,00	100,00	71.303.699.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>378.162.313.890,00</b>	<b>95,15</b>	<b>340.738.325.166,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	268.545.190.000,00	293.977.313.890,00	109,47	230.943.325.166,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	128.900.000.000,00	84.185.000.000,00	65,31	109.795.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>79.777.387.000,00</b>	<b>79.938.926.052,90</b>	<b>100,20</b>	<b>79.232.396.955,72</b>
Pendapatan Hibah	3.600.000.000,00	3.224.000.000,00	89,56	7.243.548.238,72
Pendapatan Lainnya	76.177.387.000,00	76.714.926.052,90	100,71	71.988.848.717,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.222.150.032.524,00</b>	<b>2.278.259.847.189,69</b>	<b>102,52</b>	<b>2.515.508.487.764,14</b>



## Lampiran 15 Laporan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022

**LAPORAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan 2022</b>	<b>Realisasi 2022 (Audited)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.827.398.879.589,00</b>	<b>2.745.380.962.111,75</b>	<b>97,1</b>	<b>-82.017.917.477,25</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>785.515.293.200,00</b>	<b>735.443.555.936,58</b>	<b>93,63</b>	<b>-50.071.737.263,42</b>
Pendapatan Pajak Daerah	576.075.000.000,00	574.509.798.295,40	99,73	-1.565.201.704,60
Pendapatan Retribusi Daerah	74.121.954.250,00	40.132.815.666,50	54,14	-33.989.138.583,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.767.360.950,00	11.317.875.621,62	105,11	550.514.671
Lain-lain PAD yang sah	124.550.978.000,00	109.483.066.353,06	87,9	(15.067.911.646,94)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.939.612.356.389,00</b>	<b>1.977.490.669.947,00</b>	<b>101,95</b>	<b>37.878.313.558,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.462.340.668.400,00</b>	<b>1.494.636.810.871,00</b>	<b>102,21</b>	<b>32.296.142.471,00</b>
Bagi Hasil Pajak	851.858.930.400,00	932.154.032.004,00	109,43	SO.295.101.604,00
Dana Alokasi Umum	428.306.693.000,00	419.346.840.032,00	97,91	-8.959.852.968,00
Dana Alokasi khusus	182.175.045.000,00	143.135.938.835,00	78,57	-39.039.106.165,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>44.427.677.000,00</b>	<b>44.427.677.000,00</b>	<b>100</b>	
Dana Insetif Pemerintah	44.427.677.000,00	44.427.677.000,00	100	
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>432.844.010.989,00</b>	<b>438.426.182.076,00</b>	<b>101,29</b>	<b>5.582.171.087,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	376.178.011.000,00	381.760.182.087,00	101,48	5.582.171.087,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	56.665.999.989,00	56.665.999.989,00	100,00	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>102.271.230.000,00</b>	<b>32.446.736.228,17</b>	<b>31,73</b>	<b>69.824.493.771</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.683.000.000,00	104,07	183.000.000,00
Pendapatan Lainnya	97.771.230.000,00	27.763.736.228,17	28,4	(70.007.493.771,83)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.827.398.879.589,00</b>	<b>2.745.380.962.111,75</b>	<b>97,10</b>	<b>82.017.917.477,25</b>